

**KAPABILITAS BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DALAM
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Oleh :
JEBRIL AL SYANUR
177322031

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**KAPABILITAS BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DALAM
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

(Oleh)
Nama : JEBRIL AL SYANUR
NPM : 177322031
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal

13 Juli 2019

Dr. H. Syaithendry, M.Si

Pembimbing II

Tanggal

27 - 06 - 2019

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : JEBRIL AL SYANUR
NPM : 177322031
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan :
Judul Tesis : **KAPABILITAS BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Juli 2019
Pukul : 14.00-15.00

Dan dinyatakan **LULUS**
PANTIA PENGUJI TESIS

Ketua


Dr. H. Syafhendri, M.Si

Sekretaris


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Anggota I


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Anggota II


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 047/UJR/KPTS/PS-IP/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penelitian dan penyelesaian tesis perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan bimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor : 85/M/1999
 - Nomor : 102/M/2001
 - Nomor : 228/M/2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I :
 - Nomor : 232/U/2000
 - Nomor : 234/U/2000
 - Nomor : 178/O/2001
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I :
 - Nomor : 2283/D/T/2003 Jo Nomor : 5020/D/T/2010
 - Nomor : 681/D/T/2004 Jo Nomor : 5021/D/T/2010
 - Nomor : 158/D/T/2007
 - Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - Nomor : 490/DIT/2007 Jo Nomor : 5150/D/T/2011
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo Nomor : 5019/D/T/2010
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo Nomor : 7322/D/T/K-X/2012
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - SK Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-II/1993
 - Nomor : 185/Kep.A/YLPI-VII/2005
 - SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UJR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Menunjuk :

<ol style="list-style-type: none"> Nama : Dr. H. Syafhendry, M.Si. Nama : Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. 	<ol style="list-style-type: none"> sebagai Pembimbing I sebagai Pembimbing II
--	---

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa

Nama : **JEBRIL AL SYANUR**
 N P M : **17 732 2031**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Judul Tesis : **"KAPABILITAS BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU"**

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis
 - Dalam pelaksanaan bimbingan si paya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dindahkan.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
 PADA TANGGAL 29 Juli 2019

Dr. Ir. Selbu Bahri, M.Ec.
 02 199

Tersusun : Disampaikan Kepada
 1. Yn. Bapak Kepala Wilayah X di Padang
 2. Yn. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Yn. Ketua Program Stud. Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
 4. Yn. Sor. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 5. Perisngal D.USK_BMBINGAN_doc_Zacky

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU-PERMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JEBRIL AL SYANUR**
NPM : 177322031
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Bangkinang, Februari 2019
Yang Membuat Pernyataan



JEBRIL AL SYANUR

Motto dan Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Motto

"Saya Memang Tidak Sempurna Tetapi Saya Berusaha Memberikan Yang Terbaik".

By: *Jebri Al Syanur*

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan Dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan Kehidupan yang baik...."
(QS. An-Nahl: 97)

Berjuta rasa syukur kuucapkan kepada Sang Penciptaku, atas segala karunia dan kemudahan yang telah diberikan-Nya kepadaku
sehingga menjadikanku pribadi yang mandiri dan menjadi orang yang berguna bagi orangtua dan adik-adikku

Dengan setulus hati kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu memberikan kepercayaan dan do'a tulus dalam mengiringi setiap langkahku menggapai kesuksesan

Kehadapan yang mulia kedua orang tua ku
Tiada kata yang dapat ku ucapkan untuk membalas semua kasih sayang, doa, pengorbanan baik moril maupun materil dan semangat yang telah engkau berikan. Tetes peluhmu telah mengantarkanku kepada keberhasilan ini

Kakak ku (*Ilfi Rahmi Putri Syanur, S.Pt, M.Si*) dan Adik ku (*Hijrah Parila Syanur*)....

Kalian pasti bisa menjadi yang lebih baik dan bisa membanggakan keluarga ...

Do'aku selalu menyertai kalian dalam mencapai kesuksesan , buatlah Papa dan Mama bangga dengan keberhasilan kita semua ...

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : **JEBRIL AL SYANUR**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat & Tanggal Lahir : Pariaman, 19 Oktober 1993

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Nama Orang Tua

- Ayah : H. Syafrimen, SE,MM Dt. Bagindo
- Ibu : Hj. Nurmalis, SE, MM

Riwayat Pendidikan

- SD : SD N 08 Kp. Pondok Pariaman (2000-2006)
- SMP : SMP N 1 Pariaman (2006-2009)
- SMA : SMA N 1 Pariaman (2009-2012)
- S1 : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2012-2016)
Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Riwayat Pekerjaan

- 2016-2017 : Bagian Humas dan Protokol Kab. Padang Pariaman
- 2017- Sekarang : Bagian Protokol dan Humas Kab. Kampar

Alamat Terakhir : Jl. Olahraga (Depan Stadion Tuanku Tambusai)
Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Nomor Telepon : 0852-1110-4764

Hobby : Sepak Bola dan Renang

Email : Jebripanyalai@gmail.com

KAPABILITAS BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

ABSTRAK

JEBRIL AL SYANUR

Kebakaran merupakan suatu ancaman bagi keselamatan manusia dan kejadian yang tidak diinginkan bagi setiap orang hal itu dikarenakan kebakaran dapat mengakibatkan sebuah kerugian materil maupun inmateril. Kapabilitas sangat penting dimiliki oleh organisasi dimana keunggulan suatu organisasi akan ditentukan oleh cara bagaimana sebuah organisasi memajemen lingkungan organisasi, bagaimana meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia untuk merespon dengan cepat dan tepat perubahan yang terjadi dalam organisasi. Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Bidang Damkar tergabung pada Satpol PP Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sehingga berdampak terhadap pelaksanaan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan kendala bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dengan menggunakan indikator Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Implementasi Kebijakan, Keuangan, Teknis dan Kepemimpinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga lebih mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik. Penelitian dilakukan di kantor Bidang Pemadam Kebakaran. Penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau belum semuanya berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kekurangan di dalam bidang pemadam kebakaran yaitu masih terdapatnya satu posko pemadam kebakaran di Kabupaten Kampar, masih lemahnya SDM yang dimiliki, masih minimnya anggaran yang dimiliki. Dalam penanggulangan kebakaran adapun kendala bidang pemadam kebakaran adalah kondisi armada kurang memadai, keterlambatan informasi dari masyarakat, kondisi lokasi kebakaran dan jarak tempuh. Adapun saran yang diberikan yaitu Pemerintah Daerah harus membentuk pemadam kebakaran menjadi organisasi tersendiri, Pemerintah Daerah juga harus membentuk pos pelayanan kebakaran Kecamatan, Pemerintah Daerah sekiranya melakukan rekrutmen anggota pemadam kebakaran secara tersendiri dan Pemerintah Daerah harus bisa mengatasi apa yang menjadi kendala bidang pemadam kebakaran selama ini.

Kata Kunci : Kapabilitas, Penanggulangan, Kebakaran

CAPABILITY OF FIRE DEPARTMENT IN FIRE PREVENTION IN KAMPAR REGENCY OF RIAU PROVINCE

ABSTRACT

JEBRIL AL SYANUR

Fire is a threat to human safety and the undesirable occurrence of each person is because the fire can lead to a material loss or immaterial. Very important capability of the organization where the advantages of an organization will be determined by how an organization to manage the organization's environment, how to improve human resource capabilities to respond quickly and accurately the changes in the organization. Kampar Regent Regulation No. 60 Year 2016 on Positions, Organizational Structure, Duties and Functions And Work Procedures Civil Service Police Unit Kampar, field belonging to the municipal police dept Kampar regency led by a Head of impacting the implementation of fire prevention in Kampar. The purpose of this study was to determine the capability of firefighters in the field of fire prevention and fire brigade obstacle in the field of fire prevention in Kampar regency in Riau province. By using indicators Institutions, Human Resources, Policy Implementation, Financial, Technical and Leadership. This research is a qualitative descriptive study to describe and illustrate the phenomena that there is both natural and human, more concerned about the characteristics. The study was conducted at the office of the Field Fire. The author uses observation, interview and documentation in collecting data. Based on research by the author, the capability of firefighters in the field of fire prevention in District Kampar of Riau province has not everything is going well. There are several shortcomings in the field of fire brigade is still the presence of one post firefighters in Kampar, weak human resources, still lack the budget you have. As for the fire fighting obstacle in the field of fire-fighting fleet is inadequate conditions, delay of information from the public, the condition of the fire location and mileage. The advice given that the regional government should establish a fire extinguisher into their own organizations, local government must also establish a fire service station sub-district,

Keywords: Capability, Prevention, Fire

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin. Puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan jasmani, rohani dan kesabaran serta ketaqwaan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Tesis ini berjudul **“Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Islam Riau tahun Akademik 2018/2019.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam proses penyelesaian tesis ini mendapat bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak baik materil maupun moril. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada, Papa (Syafri men, SE, MM) dan Mama (Nurmalis SE, MM), Kakak (Ilfi Rahmi Putri Syanur, S.Pt, M.Si), Adek (Hijrah Parila Syanur) dan Keponakan Tersayang (Afsheen Yafi Lakeisha Syanur) yang telah memberikan doa dan semangat yang tiada henti, tanpa dukungan dan kasih sayang beliau penulis tidak mungkin dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan karya terbaik ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL. Wakil Rektor 1 Bapak Dr. H. Syafhendry, M, Si, Wakil Rektor II Bapak Ir, H. Asrol, M.Ec dan Wakil Rektor III Bapak Ir. H. Rosyadi, M.Si.
2. Direktur Pascasarjana Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Ec dan Ketu Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M,Si.
3. Kepada Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama mengikuti proses pembelajaran di Universitas Islam Riau.
5. Kepada Kasat Pol PP Bapak Hambali, SE, MH yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bapak pimpin.
6. Kepada Kabid Damkar Bapak Edy Bahrein, SP dan Anggota Damkar yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Kepada Adha Mayasari, S.Pd yang selalu memotivasi saya disaat merasa jenuh dan lelah dalam melakukan penulisan tesis.
8. Rekan-rekan Prodi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Angkatan XXIII Kelas A terimakasih atas kebersamaanya dan canda tawanya selama satu tahun ini dalam mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Islam Riau.

9. Almamater tercinta Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan pelajaran hidup dan pengalaman yang sangat berarti serta mempertemukan penulis dengan orang-orang terbaik dari seluruh Indonesia.

10. Serta semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Tak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu masukan baik berupa saran dan kritikan sangat penulis butuhkan guna perbaikan untuk kedepannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya dan berguna bagi pembaca semua.

Selamat membaca.

Bangkinang, Juli 2019

Penulis

JEBRIL AL SYANUR

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN i

LEMBAR PERSEMBAHAN ii

RIWAYAT HIDUP PENULIS iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 14

1.3 Rumusan Masalah 15

1.4 Batasan Masalah 15

1.5	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1.5.1	Tujuan Penelitian.....	15
1.5.2	Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN		
2.1	Kajian Pustaka.....	17
2.1.1	Konsep Ilmu Pemerintahan.....	17
2.1.2	Konsep Pemerintah Daerah.....	21
2.1.2.1	Pengertian Pemerintah Daerah.....	21
2.1.2.2	Urusan Pemerintahan.....	23
2.1.2.3	Unsur Pemerintah Daerah.....	25
2.1.3	Konsep Kapabilitas Organisasi.....	22
2.1.3.1	Pengertian Kapabilitas.....	26
2.1.3.2	Pengertian Organisasi.....	28
2.1.3.3	Pengertian Kapabilitas Organisasi.....	31
2.1.4	Konsep Kewenangan.....	35
2.1.4.1	Pengertian Kewenangan.....	35
2.1.4.2	Sumber Kewenangan.....	37

2.2	Ulasan Karya	39
2.3	Kerangka Pemikir.....	43
2.4	Konsep Operasional	44
2.5	Operasional Variabel.....	45
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Metode Penelitian.....	47
3.2	Lokasi Penelitian.....	48
3.3	Informan	48
3.4	Jenis dan Sumber Data	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6	Instrumen Penelitian	52
3.7	Uji Validas Data	53
3.8.	Teknik Analis Data.....	55
3.9	Jadwal Penelitian.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kampar	58
4.1.1	Visi Misi Kabupaten Kampar.....	59

4.1.2 Letak Geografis	59
4.1.3 Topografis	61
4.1.4 Kondisi Demografis	62
4.1.5 Wilayah Administrasi.....	64
4.1.6 Pendidikan.....	65
4.1.7 Kesehatan	68
4.1.8 Agama	69
4.1.9 Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar.....	70
4.2 Hasil Penelitian	75
4.2.1 Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran	75
4.2.2 Kendala Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran	100
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran.....	104
 DAFTAR PUSTAKA	 107
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	11
Tabel I.2 Jumlah Personil Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	12
Tabel I.3 Jumlah Kebakaran di Kabupaten Kampar Pada Tahun 2017 dan 2018.....	13
Tabel I.4 Anggaran Keuangan Pada Bidang Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar Tiga Tahun Terakhir.....	13
Tabel II.1 Operasional Variabel.....	45
Tabel III.1 Jadwal Penelitian Tentang Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.....	57
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	62
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kelompok Umur Tahun 2019.....	63
Tabel IV.3 Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Jumlah Desa/kelurahan Tahun 2019.....	64

Tabel IV.4	Jumlah Sekolah Negeri/Swasta di Kabupaten Kampar Tahun 2019	66
Tabel IV.5	Jumlah Sekolah Agama Negeri/Swasta di Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	67
Tabel IV.6	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Kampar Tahun 2019	68
Tabel IV.7	Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	69
Tabel IV.8	Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Kampar Tahun 2019	70
Tabel IV.9	Daftar Urutan Kepegawaian Bidang Pemadam Kebakaran Pada satuan Polisi Pamong Parja Kabupaten Kampar	74
Tabel IV.10	Wilayah Kerja Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	77
Tabel IV.11	Personel Pemadam Kebakaran Menurut Pendidikan dan Pangkat/Golongan di Kabupaten Kampar.....	82
Tabel IV.12	Anggaran Keuangan Pada Bidang Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar Tiga Tahun Terakhir	90

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pemikir Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau ...	48
Gambar IV.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kampar	57
Gambar IV.2 Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebakaran merupakan suatu ancaman bagi keselamatan manusia dan kejadian yang tidak diinginkan bagi setiap orang hal itu dikarenakan kebakaran dapat mengakibatkan sebuah kerugian materil maupun inmateril. Dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, menyebabkan resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Penduduk yang semakin padat dan pembangunan gedung perkantoran, menimbulkan kerawanan kebakaran. Maka usaha penanggulangan harus dilakukan oleh setiap individu dan unit kerja.

Peristiwa kebakaran di Jakarta tergolong paling tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Tercatat, kasus kebakaran di Ibukota dari Januari hingga Agustus 2017 mencapai 496 kali dengan korban jiwa 33 orang meninggal dunia, 66 orang luka, dan 1.017 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.¹

¹ Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di sela-sela peresmian penempatan markas pemadam kebakaran di Kantor Badan Intilejen Negara (BIN), Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/9). "Berarti, rata-rata setiap hari itu dua titik (kebakaran). Oleh sebab itu, kami sebar kendaraan damkar (pemadam kebakaran) kita, sampai saat ini ada di 108 titik," kata Djarot. Djarot menambahkan, kasus terbanyak terjadi di daerah pemukiman padat penduduk dan pemukiman ilegal dengan penyebab utamanya diduga dari hubungan pendek arus listrik. Selain itu, kebakaran juga terjadi di gedung-gedung perkantoran akibat masih ada pengelola gedung yang belum melengkapi bangunannya dengan sarana sistem proteksi kebakaran. (<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170922125809-20-243324/jakarta-paling-tinggi-alami-kasus-kebakaran>. Di akses pada tanggal 15 Februari))

Majunya perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, Pemerintah berupaya untuk menghadirkan teknologi canggih dalam mencapai keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Di Negara Indonesia hanya dua daerah yang mampu menghadirkan kendaraan pemadam kebakaran yang berteknologi canggih yaitu Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki satu unit armada pemadam kebakaran canggih seharga 17 Milliar. Mobil yang dibeli oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) ini dapat memadamkan api meski tanpa ada petugas di atas tangga.²

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah adalah bagaimana menghadirkan aparatur yang professional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetatif yang dimiliki oleh organisasi, dan kemampuan sumber daya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi aspirasi masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara maksimal yang akhirnya dapat memberikan perlindungan yang terbaik bagi masyarakat.

² Mobil pemadam kebakaran modern dirakit dengan menggunakan Chassis Volvo dari Swedia. Mobil kebakaran tersebut dilengkapi dengan teknologi digitalisasi yang dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan pada petugas. Mobil tersebut memiliki kecanggihan dalam bekerja penanggulangan kebakaran, hal ini didukung oleh tangga setinggi 33 meter dengan kamera water monitor yang dipasang diujung tangga yang dapat menjulur ke depan hingga 20 meter dan menahan beban hingga 200 Kg, disamping itu mobil tersebut menggunakan sistem komputerisasi canggih yang berfungsi untuk mendeteksi titik api dan dilengkapi juga dengan fasilitas pompa pemadam yang berkapasitas maksimal 5000 liter air setiap menit dan kekuatan semprot yang mencapai 30 bar. Mobil tersebut mempunyai mesin kendaraan 370 HP, 6x4R dan 11000 CC. (<https://www.google.com/amp/s/camargus.com/magazine/470/amp>. Diakses pada tanggal (15 Februari))

Menurut Undang-Undang dasar 1945 memberikan keluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandanag perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintahan yaitu :³

1. Urusan Pemerintah Absolut : Urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan Pemerintahan Pusat.
2. Urusan Pemerintah Konkuren : Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintah Umum : Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menjalankan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren, yang dimana urusan tersebut telah dibagi oleh pemerintah pusat yang kemudian untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonom dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi sebagai perangkat daerah, disamping itu Pemerintah Daerah juga bertugas dalam menjakankan, mengatur dan menyelenggarakan jalanya roda pemerintah. Didalam penyelenggaraan urusan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 9

Pemerintahan Daerah memiliki keterkaitan erat dengan beberapa azas-azas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

1. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat.
2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁴

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah serta dengan memberikan hak dan kewajiban dengan menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Guna menjalankan Otonomi Daerah inilah Pemerintah membentuk suatu jajaran Pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Kepala Daerah dengan perangkat kerja yang mendukung dibawahnya. Perangkat kerja daerah inilah yang saling berintegrasi guna menghasilkan suatu yang efektif untuk menuju Pemerintahan yang baik, bersih dan beriwibawa dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks.

⁴ Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keunggulan suatu organisasi akan ditentukan oleh cara bagaimana sebuah organisasi manajemen lingkungan organisasi, bagaimana meningkatkan kapabilitas sumber daya manusianya untuk merespon dengan cepat dan tepat perubahan yang terjadi dalam organisasi. Baik itu organisasi lembaga publik maupun organisasi perusahaan, dimana memiliki ciri-ciri organisasi yang sama yaitu suatu bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu atas unsur-unsur individu, kelompok dan struktur organisasi.

Kapabilitas ataupun kemampuan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, karena merupakan tujuan atau sumber utama bagi pembangkitan dalam pengembangan kompetitif, ketidakpastian dan perubahan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa kapabilitas harus dimiliki oleh organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahankan keunggulan komperatif.

Atribut Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagai sumber daya dalam manajemen bencana dan mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengelola setiap tahap manajemen bencana. Penelitian ini mendefinisikan kemampuan sebagai sumber daya organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang berkempauan baik, diantaranya:⁵

- a. Kelembagaan
Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintahan.
- b. Sumber Daya Manusia
Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas.

⁵ Kasumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta; Gava Media. Hal 48

- c. Implementasi Kebijakan
Tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainya serta untuk memobilisasi sumber daya.
- d. Keuangan
Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktifitas dalam manajemen bencana.
- e. Teknis
Memiliki sistem logistik, manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin network dengan berbagai stakeholder.
- f. Kepemimpinan
Memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat.

Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan mengesplotasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas.⁶ Pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (*skill*) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan alasan fungsi perlindungan dan pelayanan dalam penanggulangan kebakaran sangat mutlak untuk dilakukan dan dikembangkan. Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan ada beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, diantaranya :

1. Dalam Jurnal **Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau : Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**. Geovani Meiwada mengatakan “Urgensi penelitian ini melihat mengapa Pemerintah Provinsi Riau cenderung lengah sehingga kebakaran hutan dan lahan terjadi terus menerus. Kapabilitas Pemerintah Provinsi

⁶ Amir, M. Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 86

Riau menyangkut sistem dan proses mengingat kebakaran yang terjadi bukan hanya dua kali saja. Kata Kunci : Kapabilitas, kebakaran hutan dan lahan.⁷

2. Dalam Jurnal **Kajian Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Perumahan (Suatu Kajian Pendahuluan di Perumahan Sarijadi Bandung)**. I.B.G.W Mantra mengatakan “Studi pendahuluan ini tentang kondisi perumahan dikaitkan dengan bahaya kebakaran. Studi ini tidak membuat model penataan yang terukur, tetapi hanya melakukan pendekatan konseptual”. Kata Kunci : Kerapatan bangunan, beban api dan kompartemen.⁸
3. Dalam Jurnal **Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur**. Zulkifli, Ismail, Dan Legowo Kamarubayana Mengatakan “Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan memahami upaya pengendalian kebakaran hutan yang ditetapkan di Kelurahan Sungai Merdeka dan Partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam strategi pengendalian kebakaran hutan”. Kata Kunci : Kebakaran hutan, pengendalian.⁹

Terkait mengenai beberapa kutipan jurnal tersebut, ternyata belum ada penelitian yang mengangkat dan mengkaji tentang kapabilitas Bidang Pemadam

⁷ Geovani Meiwanda. 2016. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 19 (251-263)

⁸ Ida Bagus Gede Wirawibawa Mantra. 2005. *Kajian Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Perumahan (Suatu Kajian Pendahuluan di Perumahan Sarijadi Bandung)*. *Jurnal Permukiman Natak*. 3 (1-61)

⁹ Zulkifli, Ismail, dan Legowo Kamarubayana. 2017. *Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur*. *Jurnal AGRIFOR*. 14 P (1412-6885) O (2503-4960)

Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran, sehingga penelitian ini relative bisa untuk dilakukan dan dikembangkan menjadi sebuah hasil karya penelitian.

Kabupaten Kampar adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau luas wilayah Kabupaten Kampar lebih kurang 11,289,28 Km² atau +11,62 % dari luas wilayah Provinsi Riau dan penduduk sejumlah 812.702 jiwa dan Ibukota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang Kota yang berjarak ±61 Km dari Kota Pekanbaru. Kabupaten Kampar dijuluki sebagai Negeri Serambi Mekah.

Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan diharapkan perangkat tersebut merupakan perangkat daerah yang berkualitas.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Bidang Pemadam Kebakaran tergabung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang pemadam kebakaran dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan, dan

Kepala Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini. Dalam melaksanakan tugasnya

Bidang Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas dan fungsi :¹⁰

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan bidang pemadam kebakaran dalam pelaksanaan sebagai tugas penanggulangan kebakaran dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja bidang pemadam kebakaran;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana bidang pemadam kebakaran;
- d. Mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum dan menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pemadam kebakaran;
- e. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitas/sarana/kebutuhan bidang pemadam kebakaran;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di dalam bidang tugasnya;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan secara lisan maupun tulisan;
- i. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 dan SKP;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

Agar penyelenggaraan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, maka organisasi yang dijalankan harus tertata dengan baik agar keberhasilan organisasi yang ingin dicapai dapat terealisasi. Kapabilitas memiliki tujuan utama dalam meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Adapun sumber daya yang dimaksud diantaranya atribut modal keuangan, fisik, individual dan organisasi menjadi modal dasar organisasi.¹¹

¹⁰ Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Pasal 19 Ayat (2)

¹¹ Kasumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta; Gava Media. Hal 45

Namun menjadi bidang di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar membuat pemadam kebakaran (Damkar) mengalami beberapa kendala saat bekerja, sehingga mengakibatkan belum optimalnya penanggulangan yang diberikan kepada masyarakat apabila terjadi kebakaran di Kabupaten Kampar. Melihat situasi dan kondisi di lapangan, Damkar seharusnya sudah menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga bisa mengatur diri sendiri dan bisa membuat sub dinas.

Hal itu mengingat wilayah operasional kerja petugas pemadam kebakaran di 21 Kecamatan yang ada disertai dengan jarak tempuh yang bervariasi. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus memikirkan bagaimana apabila terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Kampar, petugas pemadam kebakaran cepat dan tanggap dalam memberikan penanggulangan kebakaran. Namun sampai sekarang Kabupaten Kampar belum memiliki Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan (P2K) di Kecamatan sehingga membuat kinerja petugas pemadam kebakaran belum maksimal dalam memberikan penanggulangan kebakaran.

Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pada operasional pemadam kebakaran mengakibatkan belum optimalnya penanggulangan yang diberikan kepada masyarakat apabila terjadi kebakaran di Kabupaten Kampar. Berikut ini dapat kita lihat jumlah sarana dan prasarana operasional pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar, Pada Tabel I.1.sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional Pemadam Kebakaran
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Pemadam	8	Kurang Baik
2	Nozzle 2.5"	3	Baik
3	Nozzle 1.5"	5	Baik
4	Selang 2.5"	4	Baik
5	Selang 1.5"	9	Baik
6	Mesin Apung	1	Baik
7	Mesin Robin	1	Baik
8	Smash	1	Baik
9	Ht	8	Baik
10	Helm Personil	10	Kurang Baik
11	Baju Anti Api	5	Kurang Baik
12	Sarung Tangan	10	Baik
13	Sepatu	5	Baik
15	Masker	10	Baik

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kampar.2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran masih memiliki kondisi kurang baik, diantaranya Mobil Pemadam berjumlah 8 Unit dengan kondisi kurang baik, Helm Personil berjumlah 10 Unit dengan kondisi kurang baik dan baju anti api berjumlah 5 Unit dengan kondisi kurang baik. Disamping itu masih terbatasnya alat pendukung lainnya seperti mesin apung dan mesin robin berjumlah 1 Unit.

Disamping itu, masih minimnya jumlah personil pemadam kebakaran mengakibatkan belum optimalnya penanggulangan yang diberikan kepada

masyarakat apabila terjadi kebakaran di Kabupaten Kampar. Berikut ini dapat kita lihat jumlah personil pemadam kebakaran tahun 2019 di Kabupaten Kampar, pada tabel I.2 sebagai berikut :

Tabel I.2
Jumlah Personil Pemadam Kebakaran
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Keterangan	PNS	Non PNS	Jumlah Personel
1	Danton	0	3	3
2	Danru	4	2	6
3	Anggota	0	56	56
Total				65

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kampar.2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah personel pemadam kebakaran berjumlah 65 orang yang terdiri dari Danton 3 Orang, Danru 6 Orang dan Anggota 56 Orang. Dimana dengan jumlah yang sangat minim membuat bidang pemadam kebakaran selalu kewalahan dalam menghadapi pekerjaan di lapangan.

Berikut ini dapat kita lihat jumlah kebakaran Tahun 2017-2018 di Kabupaten Kampar, Pada Tabel I.3 sebagai berikut :

Tabel I.3
Jumlah Kebakaran Di Kabupaten Kampar
Pada Tahun 2017 dan 2018

No	Tahun	Jenis Kebakaran	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2016	1. Rumah	35	Kejadian/Tahun
		2. Ruko/Toko	27	

1	2	3	4	5
2	2017	1. Rumah 2. Ruko/ Toko	30 31	59 Kejadian/Tahun
3	2018	1. Rumah 2. Ruko/Toko	22 17	94 Kejadian/Tahun

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kampar. 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat meskipun jumlah kebakaran sudah mulai berkurang dari tahun sebelumnya, tetapi masih ditemukan kebakaran pada rumah dan Ruko/Toko di Kabupaten Kampar. Untuk tahun 2016 jenis kebakaran terbanyak adalah rumah yaitu sebanyak 35 unit, tahun 2017 jenis kebakaran terbanyak adalah ruko/toko yaitu sebanyak 31unit dan untuk tahun 2018 jenis kebakaran terbanyak adalah rumah yaitu sebanyak 22 unit dan peristiwa kebakaran terbanyak terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 94 Kejadian/Tahun.

Tabel I.4
Anggaran Keuangan Pada Bidang Pemadam Kebakaran
Di Kabupaten Kampar Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Kegiatan	Anggaran
1	2017	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.	Rp. 975.233.755,00
2	2018	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Rp. 915.522.880,00
3	2019	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Rp. 841.757.235,00

Sumber : DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar. 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar memiliki penurunan anggaran kegiatan pada 3 (tiga) tahun terakhir untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya

kebakaran, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar.

Oleh sebab itu bidang pemadam kebakaran Kabupaten Kampar selalu mengharapkan agar organisasinya dapat terus berkembang dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka pemadam kebakaran harus mampu menciptakan kapabilitas organisasi secara maksimal, karena pemadam kebakaran merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dirasakan keberadaanya oleh masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul penelitian yaitu **Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakarab di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan sementara, adanya ditemukan beberapa identifikasi permasalahan yang mengakibatkan penanggulangan kebakaran belum terlaksana dengan baik, diantaranya:

1. Belum memiliki Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan (P2K) di Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran di Kabupaten Kampar.
3. Minimnya jumlah personel pemadam kebakaran terhadap penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis dapat menarik sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau ?

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi di lapangan maka. Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada, maka peneliti membatasi masalah pada Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

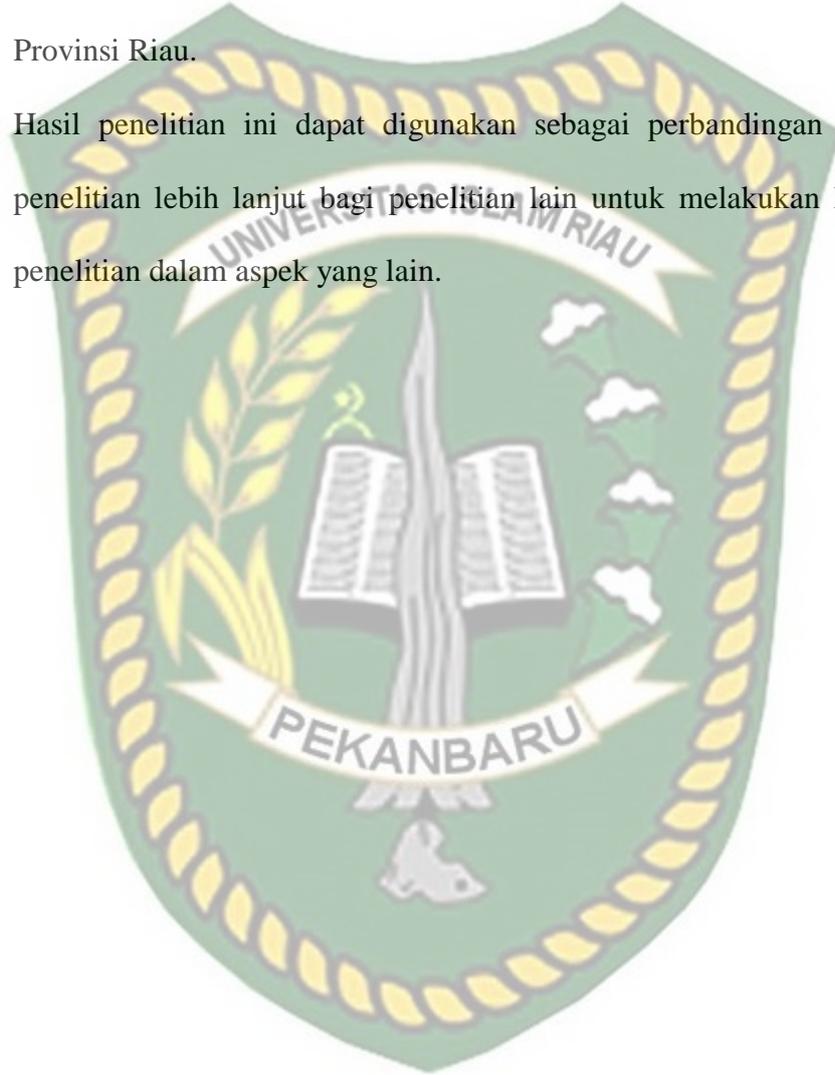
- a. Untuk mengetahui Kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini kedepannya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

- c. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik terkait kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Kajian Pustaka

Sejalan dengan pokok permasalahan, maka sangat diperlukan suatu landasan teori yang menjadi jembatan antara masalah dengan kenyataan yang dijumpai untuk dapat diuji kebenarannya sebagai jawaban dari problema – problema yang dihadapi. Untuk itu berikut akan dijelaskan beberapa teori yang ada kaitanya dengan masalah pokok penelitian.

2.1.1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang dikemudian mendapat awalan “pe” menjadi “pemerintah”, berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus Negara, serta mendapat akhiran “an” menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Menurut Musanef dalam Syafiie ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :¹²

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau;

¹² Syafiie Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Kdisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju. Hal 32.

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum, sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau;
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan membedakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara;

Pemerintahan merupakan serangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah meliputi seluruh kegiatan atau fungsi pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden beserta jajarannya mulai dari menteri sampai tukang sapu kantor-kantor, mulai dari menteri sampai dengan juru penerang, mulai dari menteri sampai kepala desa.¹³

¹³ Salam, Dharma Satyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta; Djembatan, Edisi Revisi. Hal 35

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu kelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.¹⁴

Menurut Suryaningrat dalam Zulwendri pemerintahan adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.¹⁵

Menurut Sedarmayanti pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang adil dan memiliki tugas pokok yang mencakup hal-hal sebagai berikut :¹⁶

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Didalam Pemerintahan, menunjukkan bahwa terdapat sebuah hubungan antara struktur pemerintahan dengan rakyat selalu pemegang kedaulatan tertinggi.

¹⁴ Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; PT. Alex Media Komputindo. Hal 36

¹⁵ Zulwendri, 2009. *Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Perhentian LuasKecamatan LogosTanah Darat Kabupaten Kuantan Singing (Studi Tentang Pelayanan Pemerintahan)*. Hal. 15

¹⁶ Sedarmayanti, 2004. *Manajemen Sumber Dqya Manusia*, Jakarta, Mandar Maju. Hal. 9

Dimana dalam hubungan tersebut keduanya saling menguatkan, dalam hal ini pemerintah di suatu sisi memiliki kewajiban menjalankan dan menaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.¹⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah dengan rakyat memiliki hubungan yang kuat, meskipun pemerintah adalah pembuat peraturan dan kebijakan, tetapi pemerintah juga patut untuk menjalankan dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut. Dengan hubungan tersebut tujuan dari kebijakan dan peraturan yang dibuat akan mudah tercapai.

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.¹⁸

Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan Negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan

¹⁷ Ndaraha, Talizudu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Penerbit Rienka Cipta, Hal 27

¹⁸ Muhadam Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 22

kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.¹⁹

Fungsi- fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja publik, pajak, militer dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*Regulation*).²⁰

Melalui berbagai teori sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah adalah sebuah kegiatan, cara atau sistem yang dilaksanakan oleh sekelompok orang.

2.1.2. Konsep Pemerintah Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam Bahasa Indonesia Pemerintah atau istilah *Government* berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat/rakyat di dalam sebuah Negara, baik itu Negara bagian, atau Kota. Disamping itu, dapat diartikan juga sebagai lembaga atau badan yang melaksanakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau kota dan lain-lain.

Menurut David Apter dalam Syafiie Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum dalam menjalankan tanggung jawab untuk

¹⁹ *Ibid.* Hal 22

²⁰ *Ibid.* Hal 22

mempertahankan suatu sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaanya.²¹

Daerah adalah sebuah wilayah di didalam lingkungan pemerintah, dimana wilayah daerah tersebut bagian dari permukiman bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.²²

Pemerintah Daerah juga memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam mengatur pemerintahannya dengan caranya sendiri. Dalam hal ini bukan berarti kebebasan yang seluas-luasnya tanpa berpedoman kepada peraturan, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat peran sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

C.F Strong menyebutkan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah organisasi yang terdapat didalamnya sebuah hak dalam menjalankan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Disamping itu, dalam arti luas Pemerintahan adalah sesuatu yang lebih besar dari badan, organisasi atau kelompok.²³

Keberadaan Pemerintah Daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

²¹ Inu Kencana Syafie. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Refika Aditama. Hal 11.

²² G. setya Nugraha, R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya. Hal. 145.

²³ Fahmi Amrusi. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nasamedia; Bandung. Hal 28.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dipegang oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sementara itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didalam Pasal 18 Ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi menjadi Kabupaten dan Kota. Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.1.2.2. Urusan Pemerintahan

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada hakekatnya melaksanakan “urusan pemerintahan”. Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari :²⁵

1. Urusan Absolut, Merupakan urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 Ayat (2)

²⁵ Rauf Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Nusamedia; Yogyakarta. Hal 357

dan mendasar dalam kehidupan berbagai dan bernegara, sehingga perlu di atur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia.

Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, Yakni : Urusan Politik Luar Negeri, Agama, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, Pertahanan dan Keamanan.

2. Urusan Konkuren, Merupakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (6 Urusan) dan non pelayanan dasar (18 Urusan) dan Pemerintahan pilihan (8 Urusan). Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten Kota di dasarkan pada Prinsip :

- a. Akuntabilitas
- b. Efisiensi
- c. Eksternalitas, dan
- d. Kepentingan strategis nasional.

3. Urusan Pemerintahan Umum, merupakan urusan Pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah.

2.1.2.3. Unsur Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 57, yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan di bantu oleh perangkat daerah”.

Dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah, yakni Kepala Daerah dan lembaga DPRD yang berada pada posisi sejajar, sehingga disebut unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dan kedua unsur Pemerintah Daerah ini dibantu oleh perangkat daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah.²⁶

Keberadaan dari unsur-unsur perangkat daerah di atur Pasal 209 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yakni :²⁷

1. Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari ;
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas
 - e. Badan

²⁶ *Ibid.* Hal 361

²⁷ *Ibid.* Hal 362

2. Perangkat Daeeah Kabupaten/Kota terdiri dari ;
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas
 - e. Badan
 - f. Kecamatan

2.1.3. Konsep Kapabilitas Organisasi

2.1.3.1. Pengertian Kapabilitas

Kapabilitas adalah sebagai potensi dalam menjalankan kegiatan tertentu atau serangkaian kegiatan. Dimana dalam istilah “kecakapan” dipakai untuk merujuk pada kemampuan kita dalam menjalankan kegiatan fungsional, sementara “kapabilitas” juga dianggap bagaimana mengkombinasikan berbagai kecakapan.²⁸

Moherino mendefenisikan kapabilitas sebagai sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.²⁹

Dalam menjalankan aktivitas tertentu kemampuan dan kecakapan seseorang dalam bekerja sangat menentukan kualitas hasil pekerjaan tersebut. Tinggi atau rendahnya kapabilitas seseorang dalam bekerja dapat dijadikan standar penilaian kinerjanya.

²⁸ Amir, M. Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 88

²⁹ Moherino. 2009. *Pengukuran Kinerja Bersbasis Kompetensi*. Bogor; Ghalia. Hal 4

Rudana menyatakan pengertian kapabilitas adalah sebuah sikap mendasar yang dimiliki seseorang yang berdampak langsung terhadap atau dapat mempredisikan, kinerja yang sangat baik.³⁰

Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Kapabilitas adalah kemampuan mengexploitasi secara baik sumber daya ataupun potensi yang ada didalam organisasi maupun didalam diri, serta memiliki potensi diri dalam menjalankan kegiatan ataupun serangkaian kegiatan tertentu.³¹ Ibarat seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain gitar bisa bermain gitar dengan baik. Ini sangat ditentukan bagaimana ia mengembangkan dirinya untuk tetap gigih dan belajar.

Kapabilitas pada dasarnya menggambarkan kemampuan dalam menggunakan sumber-sumber daya. Dalam prakteknya seseorang tidak hanya mampu bekerja dengan hanya mengandalkan satu sumber daya saja saja tetapi mampu mengelola dan mengimplementasi dari keseluruhan sumber daya yang tersedia.

Schreyogg dalam Kasumasari, Kapabilitas bukan hanya merepresentasikan salah satu sumber daya saja, tetapi menunjukkan terhadap sumber daya lain,

³⁰ Rudana. 2006. *Pengaruh Kapabilitas dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta; STIA LAN. Hal 6

³¹ Amir, M. Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 86

diantaranya teknologi atau tenaga kerja, asset keuangan, tetapi lebih merupakan cara yang khas dan unggul dalam mengalokasikan sumber daya.³²

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kapabilitas ataupun kemampuan sangat penting dimiliki oleh organisasi, karena kemampuan diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama bagi pembangkitan dan pengembangan kompetatif, ketidakpastian dan perubahan lingkungan menjadi alasan kapabilitas harus dimiliki oleh organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahankan keunggulan komperatif.

2.1.3.2. Pengertian Organisasi

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

Secara sederhana organisasi merupakan wadah atau sarana dalam mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi sebagai suatu kesatuan diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

³² Kasumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta; Gava Media. Hal 45

Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.³³

Sebuah organisasi memang harus jelas tujuan serta berbagai hal yang akan dilakukan didalamnya tertuang dalam visi dan misi organisasi tersebut. Tentunya hal ini sudah ditentukan sejak awal karena berkaitan dengan pembagian tugas serta bentuk kerjasama yang akan dilakukan masing-masing anggota yang ada didalamnya. Sehingga tujuan ini menjadi poin yang sangat penting dimiliki sebuah organisasi dalam mengoptimalkan kinerja yang ada didalamnya.

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.³⁴ Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.

Dalam masyarakat luas, organisasi-organisasi tertentu bisa menjadi tempat mereka bergantung dan bekerja. Organisasi dapat berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Jika dikembangkan dengan tepat maka anggota yang bekerja didalamnya juga akan mendapatkan pengalaman serta pembelajaran.

³³ Pradjudi, Armosudiro. 2006. *Konsep Organisasi*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Hal 12

³⁴ Hasibuan. Malayu.S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Bumi Aksara. Hal 120

Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekankan angka pengangguran.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi sosial dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya, Karen itulah ,manusia berkumpul dan membentuk sebuah kelompok atau organisasi.

Orang-orang yang ada didalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur. Bentuk Organisasi yaitu :³⁵

1. Organisasi Garis

Organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Organisasi ini sering juga disebut sebagai organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.

2. Organisasi Fungsional

Organisasi Fungsional merupakan organisasi di mana seorang pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan memiliki

³⁵ Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Hal 61

wewenang dalam memberi perintah maupun petunjuk kepada bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.

3. Organisasi Garis dan Staf

Organisasi ini biasanya terdapat pada sebuah organisasi besar, dibuktikan dengan jumlah pegawai yang banyak, wilayah kerja yang luas dan mempunyai tugas yang bervariasi serta sulit. Dalam organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.

4. Organisasi Staf dan Fungsional

Organisasi staf dan fungsional adalah kombinasi atau perpaduan dari sebuah organisasi fungsional dan organisasi garis dan staf.

Organisasi formal ataupun informal merupakan sebuah organisasi baik yang harus diterapkan di dalam melaksanakan segala aktivitas, maka terdapat hubungan diantara orang-orang yang menjalankan aktivitas tersebut. Semakin banyak rangkaian kegiatan yang dikerjakan, maka akan semakin erat hubungan yang terjalin. Untuk mengatasi permasalahan itu, maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan sebuah hubungan kerja antar kelompok/bagian.

2.1.3.3. Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas Organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan rantai nilai. Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi, akan tetapi yang perlu digaris bawahi

kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber daya dalam organisasi.

Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hirarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi.

Kapabilitas pada dasarnya menggambarkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber-sumber dayanya. Baik terwujud (*tangible*) maupun nirwujud (*intangibile*) untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa. Kapabilitas tersebut baru ada, bila sumber-sumber daya itu telah dapat diintegrasikan sesuai tujuannya, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, atau sejumlah tugas yang diharapkan. Sehingga dengan demikian kapabilitas menunjukkan kemampuan organisasi memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber dayanya.³⁶

Dalam mengembangkan kapabilitas organisasi ada beberapa faktor pendukung yang dapat mendorong cepat tercapainya tujuan suatu organisasi seperti sumber daya, teknologi maupun lingkungan organisasi tersebut.

Kapabilitas organisasi ialah kapasitas organisasi dimana menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dicapai didalam organisasi. Disamping itu, kapabilitas organisasi juga memerlukan

³⁶ Assauri, Sofian. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta; Rajawali Pers. Hal 54

berbagai keahlian ataupun skill individual yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya.³⁷

Pengelolaan dan manajemen yang baik ikut mempengaruhi kapabilitas organisasi, hal ini bisa dilihat dari kemampuan organisasi tetap bertahan meskipun adapun perubahan di lingkungannya.

Menurut Teece, Et al dalam Sampurno Kapabilitas organisasi menekankan pada peran kunci manajemen stratejik dalam adaptasi yang tepat, integrasi dan rekonfigurasi internal dan skill organisasional, sumber daya dan kompetensi fungsional sehingga terjadi kesesuaian dengan perubahan lingkungan.³⁸

Amit dan Schoemaker dalam Kusumasari berpendapat bahwa kapabilitas organisasi sebagai kapasitas organisasi untuk mengarahkan dan mengatur sumber daya, serta menggunakan proses dan mekanisme sebuah organisasi untuk mempengaruhi tujuan yang diinginkan.³⁹ Definisi ini memiliki dua fitur utama :

- a. Kapabilitas adalah atribut dari sebuah organisasi yang memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam penerapan strategi.
- b. Tujuan utama kapabilitas adalah untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sumber daya yang dimaksud disini adalah atribut modal keuangan, fisik, individual dan organisasi yang menjadi modal dasar organisasi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka kapabilitas organisasi adalah kemampuan sebuah organisasi dalam mengintergrasi dan mengeksplorasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi, baik sumber daya manusianya, keuangan, kelembagaan dan lain-lain. Kapabilitas

³⁷ Sampurno, 2011. *Manajemen Strategi, Menciptakan Keunggulan Bersaing Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press. Hal 52

³⁸ *Ibid.* Hal 37

³⁹ Kasumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta; Gava Media. Hal 45

organisasi tidak akan dapat tercipta dengan sendirinya atau satu sumber daya saja tanpa adanya dukungan dengan sumber daya lainnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan kapabilitas organisasi, adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Fungsi Keuangan
Sumber dana, cara pengelolaannya, sehingga menciptakan keuangan yang sehat dalam perjalanan aktivitas dari organisasi tersebut.
- b. Operasi
Memiliki sistem operasi yang baik apakah mau kontinu (dimana produk diproses secara berkelanjutan sehingga perlu perangkat otomatis) atau bisa juga yang berkaitan dengan operating leverage, terkait dengan bagaimana dampak aktivitas penjualan berdampak pada pendapatan.
- c. Sumber Daya Manusia
Memiliki tim kerja yang solid, hubungan industrial, mutu suasana kerja yang baik, serta perhatian perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Atribut Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagai sumber daya dalam manajemen bencana dan mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengelola setiap tahap manajemen bencana. Penelitian ini mendefinisikan kemampuan sebagai sumber daya organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang berkemampuan baik, diantaranya:⁴¹

- g. Kelembagaan
Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintahan.
- h. Sumber Daya Manusia
Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas.
- i. Implementasi Kebijakan
Tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainya serta untuk memobilisasi sumber daya.

⁴⁰ Amir, M. Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 98

⁴¹ Kasumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta; Gava Media. Hal 48

- j. Keuangan
Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktifitas dalam manajemen bencana.
- k. Teknis
Memiliki sistem logistik, manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin network dengan berbagai stakeholder.
- l. Kepemimpinan
Memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dimana peneliti akan menggunakan teori kapabilitas organisasi yang dikemukakan oleh Kasumasari dengan menggunakan 6 (enam) indikator yaitu Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Implementasi Kebijakan, Keuangan, Teknis dan Kepemimpinan.

2.1.4. Konsep Kewenangan

2.1.4.1. Pengertian Kewenangan

Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.⁴²

Setiap perbuatan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, dimana diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

⁴² Jimly Asshidiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Sarjana*. Jakarta; Sinar Garafika. Hal 33

bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴³

Dari beberapa pendapat ahli disebutkan bahwa wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah tindakan sementara wewenang terkandung didalamnya hak dan kewajiban. Seperti yang dikemukakan Bagir Manan wewenang dalam buku bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁴⁴

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴⁵

Dalam pemerintahan, kewenangan seorang pejabat adalah kewenangan yang bersifat formal dimana kewenangan tersebut menyangkut tindakan hukum dan hal-hal lainnya yang bersifat formal. Kewenangan ini memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah kajian hukum dan administrasi Negara.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal

⁴³ Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi; Makasar. Hal 35

⁴⁴ Nurmayanti S.H, M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. Hal 26

⁴⁵ Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 71

yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.⁴⁶

Berdasarkan pengertian kewenangan diatas menurut para ahli, penulis juga dapat pendapat bahwa kewenangan adalah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi dalam mencapai tujuan dari organisasi, dimana dalam menjalankan kewenangnya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2. Sumber Kewenangan

Didalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan dan pejabat harus berpedoman kepada kewenangan yang sah. Dimana terdapat tiga aspek dalam pengaturan mengenai keuangan Negara yaitu pengelolaan keuangan Negara, aspek perebendaharaan Negara dan pengawasan keuangan Negara. Di dalam HAN dikenal sebuah konsep tentang sumber-sumber kewenangan administrasi Negara, kewenangan itu diperoleh melalui 2 sumber, yaitu :⁴⁷

1. Atribusi yaitu wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
2. Pelimpahan
 - a. Mandat merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

⁴⁶ *Ibid.* Hal 90

⁴⁷ M. Makhfudz. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Garaha Ilmu; Jakarta. Hal 13

- b. Delegasi merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan wewenang kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

Adapun terdapat perbedaan anatara delegasi dan mandat berdasarkan beberapa unsur :

1. Prosedur pelimpahan

Mandat dalam hubungan rutin atasan bawahan, hal biasa kecuali dilarang tegas, sedangkan delegasi, dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tanggung Jawab Jabatan dan tanggung gugat

Mandat merupakan tetapan pada pemberi mandate, sedangkan delegasi merupakan tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegataris.

3. Tata naskah dinas

Mandat dapat dituliskan atas nama (a.n), untuk belia (u.b) sedangkan tanpa atas nama (a.n) atau langsung dituliskan secara terang pemegang tanggung jawab kewenangan.

Sebuah kewenangan Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, adalah :⁴⁸

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/Kota.
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 13 Ayat (2)

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, terdapat pemberian wewenang yang dilakukan melalui suatu tahapan yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Didalam sebuah desentralisasi juga terdapat dua bentuk desentralisasi yaitu desentralisasi politik adalah merupakan wewenang dalam membuat keputusan dan melakukan pengawasan tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintahan local dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat local. Kewenangan mulai dari peraturan sampai keputusan substansial.⁴⁹

2.2. Ulasan Karya

Ulasan karya merupakan ulasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan dan dipublikasikan serta selaras dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁰

1. Geovani Meiwanda

Judul penelitian **Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas pengendalian Pemerintah Provinsi Riau selama ini berfokus pada kabut asap, yaitu tahap pemadaman saja.

⁴⁹ La Ode Bariun. 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Kosntitusi Dalam Penyelesaian Sangketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Makassar; Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Hal. 136

⁵⁰ Syafhendri. 2017. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru. Hal. 9

2. Mariana

Judul penelitian **Responsivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum responsivitas pelayanan kebakaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten gowa masih kurang responsife. Ada beberapa kekurangan yang ditemukan diantara kurang cepatnya petugas pemadam kebakaran dalam melayani permintaan masyarakat karena seing terkendala pada akses jalan, sarana dan prasarana, jumlah personil dan minimya pengetahuan akan teknik memadamkan.

3. Muhammad Riduansyah

Judul penelitian **Peran Dinas Pemadam Kebakaran dalam Mensosialisasikan Bahaya dan Pencegahan Kebakaran di Kota Samarinda**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas pemadam kebakaran dalam mensosialisasikan bahaya dan pencegahan kebakaran di Kota Samarinda sebagai komunikator melalui komunikasi tatap muka (*face to face*) merupakan salah satu komunikasi yang paling efektif dinas pemadam kebakaran dalam melakukan sosialisasi berupa penyuluhan.

4. Prima Widayanto

Judul Penelitian **Analisis Kerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran di Dinas Kebakaran Kota Semarang**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saran kepada pihak dinas yaitu menyusun komposisi personil sesuai dengan tingkatan organisasi pemadam, penempatan jabatan selain berdsarkan kepangkatan tetapi juga seharusnya lebih

didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki, penerimaan personil seharusnya didasarkan berdasarkan kebutuhan WMK.

5. Hana Rosila

Judul penelitian **Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Terhadap Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melakukan kesiapsiagaan bencana kebakaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melakukan duplikasi dan dispersal, menyediakan alat kebakaran seperti APAR, hidran, smoke detector, ruangan tahan api, cctv dan pendingin ruangan.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah :

1. Geovani Meiwanda

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengangkat penelitian dengan konsep kapabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar sedangkan penelitian sebelumnya di Provinsi Riau dan penelitian mengangkat permasalahan penanggulangan kebakaran bangunan dan gedung sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

2. Mariana

Dalam penelitian ini tidak terdapat persamaan dengan apa yang peneliti lakukan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengangkat permasalahan kapabilitas sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan responsivitas dan lokasi penelitian dilakukan di Bidang

Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar sedangkan penelitian sebelumnya di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa.

3. Muhammad Riduansyah

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan lokasi instansi penelitian lakukan yaitu pada pemadam kebakaran. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Samarinda.

4. Prima Widayanto

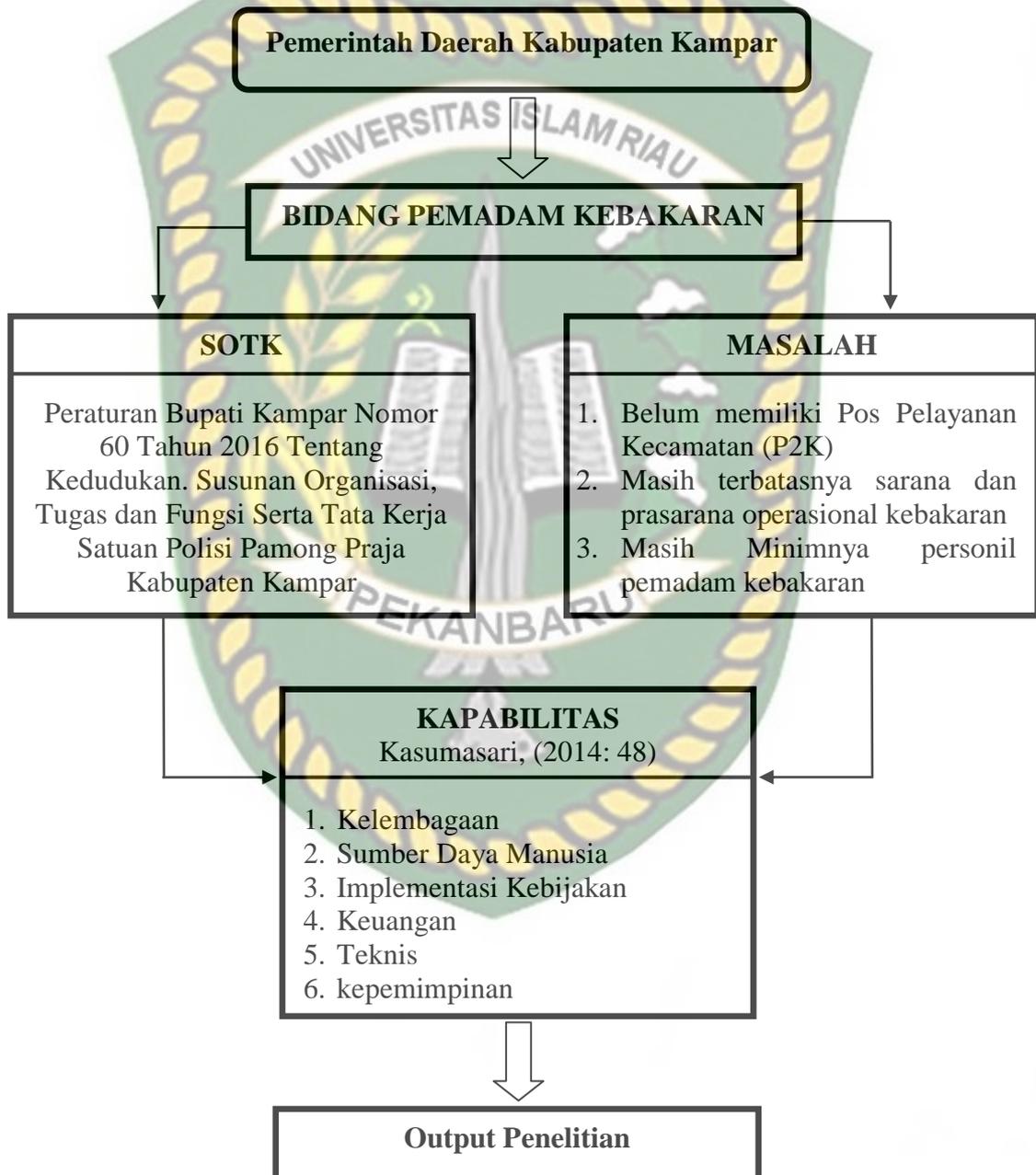
Dalam penelitian ini tidak terdapat persamaan dengan apa yang peneliti lakukan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengangkat permasalahan kapabilitas sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan analisis kerja tim pemadam kebakaran dan lokasi penelitian di lakukan di Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar sedangkan penelitian sebelumnya di Kota Semarang.

5. Hana Rosilia

Dalam penelitian ini tidak terdapat persamaan dengan apa yang peneliti lakukan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengangkat permasalahan kapabilitas sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran dan lokasi penelitian di lakukan di Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar sedangkan penelitian sebelumnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.

2.3. Kerangka Pemikir

Gambar II.1
Kerangka Pemikir Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam
Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau



Sumber : *Olahan Penelitian, 2019*

2.4. Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, persepsi atau untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan keracuan definisi tentang beberapa konsep, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional, yaitu :

1. Kapabilitas

Kemampuan mengesplotasi secara baik sumber daya ataupun potensi yang ada didalam organisasi maupun didalam diri, serta memiliki potensi diri dalam menjalankan kegiatan ataupun serangkaian kegiatan tertentu.

2. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang yang terletak pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pemadam kebakaran.

3. Penanggulangan kebakaran

Suatu usaha mengatasi terjadinya kebakaran yang didalamnya termasuk usaha pemadaman, usaha melkalisir untuk mencegah kemungkinan meluasnya kebakaran, mengevakuasikan karyawan serta menyelamatkan jiwa/harta benda.

4. Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintahan.

5. Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas.

6. Implementasi Kebijakan

Tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainya serta untuk memobilisasi sumber daya.

7. Keuangan

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktifitas dalam manajemen bencana.

8. Teknis

Memiliki sistem logistik, manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin network dengan berbagai stakeholder.

9. Kepemimpinan

Memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat

2.5. Operasional Variabel

Tabel II.1
Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Kapabilitas adalah Kemampuan mengesploitasi secara baik sumber daya ataupun potensi yang ada didalam organisasi maupun	Kapabilitas	1. Kelembagaan	a. Organisasi b. Aktivitas
		2. Sumber Daya Manusia	a. Skill/Kualitas b. Rekrutmen

1	2	3	4
<p>didalam diri, serta memiliki potensi diri dalam menjalankan kegiatan ataupun serangkaian kegiatan tertentu. (Amir, M. Taufik. 2011)</p>		3. Implementasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur b. Tindakan c. Formulasi
		4. Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penganggaran b. Pendapatan c. Upah
		5. Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi b. Informasi
		6. Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan b. Motivasi c. Mempengaruhi

Sumber : *Olahan Penelitian 2019*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran pemecahan masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰¹ Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan manipulasi atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁰²

¹⁰¹ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* cetakan kedua puluh . Bandung: Alfabeta. Hal 2

¹⁰² Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 73

Berdasarkan keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Disini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Bidang Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena belum optimalnya penanganan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar.

3.3. Informan

Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Informan adalah orang atau sumber informasi dalam penelitian, terdiri dari key informan dan informasi pendukung.¹⁰³ Adapun informan dimaksud adalah : Kasat Pol PP, Anggota DPRD, Kabag Organisasi, Kabid Damkar, Kasi Pengendalian dan Penanggulangan, Anggota Damkar dan Korban Kebakaran.

¹⁰³ Syafhendri. 2017. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru. Hal. 14

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan hal yang utama dalam suatu proses penelitian atau pengamatan. Dalam melakukan sebuah pengamatan diperlukan sumber data yang bertujuan untuk menggali informasi pada suatu pengamatan. Menurut Arikunto data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.¹⁰⁴

Sumber data mampu memahami dan mengidentifikasi latar data (lingkungan natural dan artifisial atau keduanya) dan sumber data (*intern* dan *ekstern* atau keduanya maupun data primer dan data sekunder), akan memudahkan peneliti untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat guna dan hasil guna dan memudahkan melakukan pengumpulan data.¹⁰⁵

Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden. di lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara pertemuan *face to face* (tatap muka), dalam hal ini data yang berkaitan dengan kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran diantaranya meliputi data hasil kuesioner dan hasil wawancara dan observasi.

¹⁰⁴ Arikunto, Suharismi, 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)* cetakan keempat belas. Jakarta: Rhineka Cipta. Hal 161

¹⁰⁵ Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial* cetakan ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 289

2. Data sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini. Data ini bisa berupa penjelasan umum, struktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja, keadaan geografis, dan data sekunder yang dianggap perlu dan berguna bagi peneliti.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Teknik observasi (pengamatan)

Obeservasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi).¹⁰⁷

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa, atau mencatat karakteristik fisik dalam pengaturan yang alamiah. Observasi bisa terbuka (semua orang tahu bahwa mereka sedang diamati)

¹⁰⁶ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* cetakan kedua puluh . Bandung: Alfabeta. Hal 224

¹⁰⁷ Syafhendri. 2017. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru. Hal. 16

atau terselubung (tidak ada yang tahu mereka sedang diamati dan pengamat yang tersembunyi).

Di dalam kegiatan penelitian ini, penulis akan melakukan observasi terhadap kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

2. Teknik Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.¹⁰⁸

Wawancara adalah proses memberi keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰⁹

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini instrumen yang penulis sendiri yang terjun langsung ke lokasi penelitian selaku subjek dengan kata lain bahwa penulis merupakan instrumen utama dalam penelitian.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.* Hal. 16

¹⁰⁹ Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalis Indonesia. Hal 193

¹¹⁰ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* cetakan kedua puluh. Bandung: Alfabeta. Hal 420

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui usaha pengumpulan sejumlah dokumen, studi kepustakaan, arsip, dan bahan tertulis lainnya yang bersumber dari lokasi lain yang dianggap berhubungan dengan bahan penelitian. (dapat dilengkapi dengan visualisasi berupa foto, video dan sejenisnya).¹¹¹

Dokumentasi dalam pengamatan ini penulis peroleh meliputi dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penanggulangan kebakaran di Kabupatten Kampar, Struktur Organisasi Satpol PP, arsip serta dokumen-dokumen lainnya.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti.¹¹² Sama halnya dalam penelitian ini, instrument penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri. Tambahan lagi, instrumen yang akan digunakan berupa kamera, *voice recorder*, dan buku catatan serta lembar *checklist*.

- a. Kamera untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

¹¹¹ Syafhendri. 2017. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru. Hal. 17

¹¹² Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* cetakan kedua puluh . Bandung: Alfabeta. Hal 224

- b. *Voice recorder* berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan *voice recorder* dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak computer yang kecil, notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.

3.7. Uji Validas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.¹¹³

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability* (objektivitas).

Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *uji credibility*. Adapun teknik yang dilakukan antara lain :

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui

¹¹³ *Ibid.* Hal 224

maupun yang baru. Dengan pengamatan ini berarti hubungan penelitian dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan data berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.¹¹⁴

2. Trigulasi

Trigulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber ke sumber lain pada saat yang berbeda atau membandingkan data yang memperoleh dari sumber ke sumber lain dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengecek atau membandingkan data penelitian yang dilakukan sehingga informasi yang didapatkan memperoleh kebenaran.

3. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam

¹¹⁴ *Ibid.* Hal 271

laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih akurat.¹¹⁵

4. Mengadakan *membercheck*

Membercheck dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan data. *Membercheck* dilakukan setiap akhir kegiatan wawancara dalam hal ini, peneliti berusaha mengulang kembali garis besar hasil wawancara berdasarkan catatan yang dilakukan peneliti agar informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data.

Jadi, tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.¹¹⁶

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah karena diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau mengkaji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹⁷

Adapun tiga alur kegiatan yang terjadi didalam sebuah kegiatan analisis, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

¹¹⁵ *Ibid.* Hal 275

¹¹⁶ *Ibid.* Hal 276

¹¹⁷ *Ibid.* Hal 224

Ketiga langkah-langkah tersebut akan dipergunakan penulis di dalam analisis data antara lain sebagai berikut :¹¹⁸

1. Reduksi data

Diperoleh dari sebuah data hasil wawancara, observasi, maupun kuesioner pada lokasi penelitian ditulis dalam bentuk uraian yang terperinci. Mereduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, disertai dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga memperoleh data yang memberikan gambaran jelas dan memudahkan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sangat banyak akan sulit ditangani dan sulit dilihat hubungannya. Oleh karena itu, diusahakan membuat data yang dapat dipahami dengan mudah melalui penyajian data,

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Kesimpulan awal yang ditetapkan sementara, akan mudah berubah bila ditemukan bukti-bukti yang baru dan kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan awal telah didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

¹¹⁸ Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial* cetakan ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 339

3.9. Jadwal Penelitian

Tabel III.1
Jadwal Penelitian Tentang Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																											
		Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019				Apr 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	■	■	■	■																								
2	Seminar Usulan Penelitian									■																			
3	Riset										■	■																	
4	Penelitian Lapangan													■	■	■	■												
5	Pengolahan dan Analisis Data																	■	■	■	■								
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Ujian Tesis																												■

Sumber : Pedoman Penulisan Tesis Program M.IP. 2017

Keterangan : ■ Pelaksanaan Kegiatan

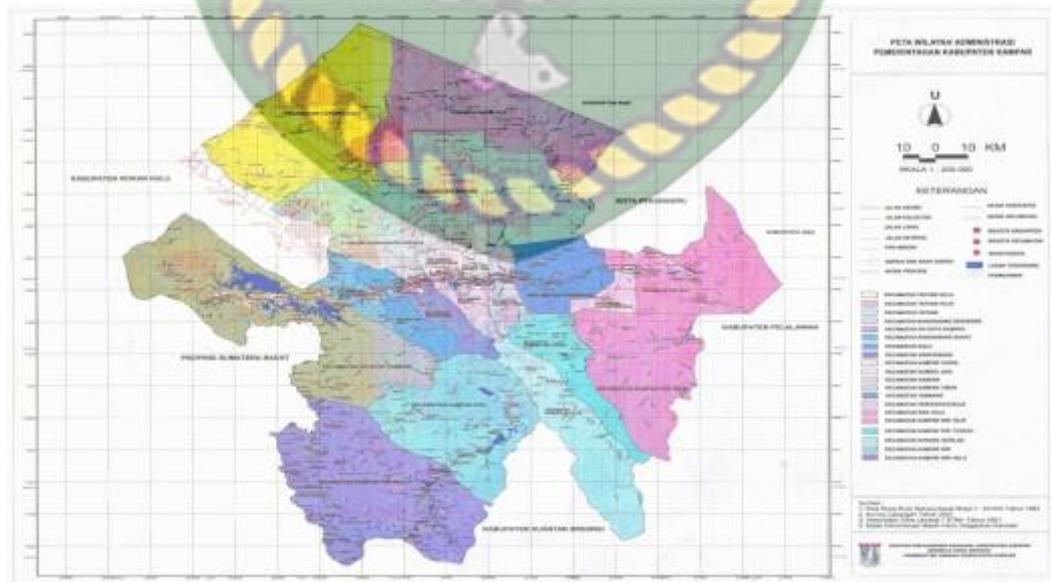
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Dalam perkembangan waktu, sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181), Pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, dua Kabupaten baru tersebut yaitu Rokan Hulu dan Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati Wilayah I dan Bupati Wilayah II.

Gambar IV.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kampar



Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka. 2017

4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Visi Misi merupakan konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu.

Adapun Visi Misi Program Kerja H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH dalam memimpin Kabupaten Kampar 2017-2022 adalah **Mewujudkan Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri Berbasis Pertanian dan Perkebunan dengan Masyarakat yang Berakhlak, Berbudaya dan Beradab Menuju Masyarakat Sejahtera.**

Sebagai penjabaran Visi tersebut, dirumuskan Misi Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional.
2. Membuka kawasan pertanian yang modern.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
4. Melestarikan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat.
5. Melestarikan Kabupaten Kampar sebagai serambi mekahnya Riau
6. Mempertahankan *Brand Image* bahwa Kampar Berbudaya, Berakhlak dan Religius.

4.1.2. Letak Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01 000'40" Lintang Utara sampai 00 027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Wilayah Kabupaten Kampar yang secara geografis didominasi daerah perbukitan, terdapat aliran sungai yang menjadi sumber pengairan bagi masyarakat. Beberapa sungai tersebut yaitu :

- **Sungai Kampar Kanan** yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang melewati Kecamatan, XIII Koto Kampar, Bangkinang Kota, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- Sungai Kampar kiri yang melewati kecamatan Kampar kiri, Gunung Sahilan dan kecamatan Kampar Kiri Hilir.
- Sungai Tapung panjangnya \pm 90 km dan dengan kedalaman rata-rata 8-12 m, melintasi Kecamatan Tapung.

Tiga sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Terdapat waduk PLTA Koto Panjang dengan luas genangan 12.000 ha pada bagian hulu sungai Kampar kanan. Disamping itu difungsikan juga sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dapat menyuplai kebutuhan energi listrik sebesar 114 mw.

4.1.3. Topografis

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang bukit barisan yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40%. Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 220c – 330c, kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94%, dan curah hujan rata-rata 283 mili meter pertahun.

Kondisi lahan tanah yang relative subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat argonosol, glei humus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah argasonol tersebar luas didaratan rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus, semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

Dari 1.128.928 ha luas wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan data tahun 2009, seluas 10.476 ha (0,93%) merupakan tanah sawah (wed field), 353.505 ha (31,31%) lahan perkebunan (dry field) dan 196.505 ha (17,41%) adalah hutan (forest). Di Kabupaten Kampar hutan seluas 473.143,17 ha menurut fungsinya sampai dengan tahun ini adalah hutan lindung seluas 29.906,04 ha (7,09%) hutan konservasi 103.136,29 ha (20,70%), hutan produksi terbatas 303.351,42 ha (65,18%) dan seluas 36.749,42 ha (7,03%) merupakan hutan produksi.

Pembangunan di sub sektor kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam, fungsi hutan, lingkungan hidup, air dan lain-lain.

4.1.4. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan modal utama dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, berhasil atau tidaknya tujuan dan maksud yang hendak di capai terletak pada manusia itu sendiri. Oleh karena itu harus ada perhatian khusus terhadap masalah kependudukan. Penduduk yang jumlahnya besar tidak selalu menghambat pembangunan, kerana jumlah penduduk dapat dijadikan sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan asal berpotensi tinggi, dapat dibina dan diarahkan.

Pertambahan penduduk yang sangat pesat akan mengakibatkan dua alternatif yaitu sebagai pendukung pembangunan berarti bertambahnya tenaga kerja atau sebagai penghambat pembangunan dalam artian adanya pengangguran. Berikut ini dapat kita lihat jumlah penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.1, sebagai berikut :

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	417.085
2	Perempuan	395.617
Jumlah		812.702

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka. 2017

Berikut ini dapat kita lihat jumlah penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel IV.2, sebagai berikut :

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar
Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	47.802	45.579	93.381
2	5-9	44.042	41.335	85.377
3	10-14	42.023	39.509	81.532
4	15-19	36.714	34.313	71.027
5	20-24	35.352	33.763	69.115
6	25-29	36.083	35.384	71.467
7	30-34	35.074	34.556	69.640
8	35-39	33.862	32.732	66.594
9	40-44	31.161	28.331	59.492
10	45-49	25.090	22.331	47.421
11	50-54	18.321	15.891	34.212
12	55-59	12.911	11.455	24.366
13	60-64	7.811	7.358	15.169
14	65+	10.839	13.070	23.909
Jumlah		417.085	395.617	812.702

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka. 2017

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Kabupaten Kampar memiliki penduduk berjumlah 812.702 Jiwa, dimana laki-laki berjumlah 417.085 jiwa dan perempuan 395.617 jiwa. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

4.1.5. Wilayah Administrasi

Ibukota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang Kota yang berjarak ±61 Km dari Kota Pekanbaru. Berikut ini dapat kita lihat luas wilayah Kabupaten Kampar menurut Jumlah Desa/Kelurahan, pada tabel IV.3, sebagai berikut :

Tabel IV.3
Luas Wilayah Kabupaten Kampar
Menurut Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2019

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas
1	2	3	4	5
1	Kampar Kiri	1	19	915.33
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	1.301.25
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	759.74
4	Gunung Sahilan	-	11	597.97
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	330.59
6	XIII Koto Kampar	1	12	732.40
7	Koto Kampar Hulu	-	6	674.00
8	Kuok	-	9	151.41
9	Salo	-	6	207.83
10	Tapung	-	25	1.365.97
11	Tapung Hulu	-	14	1.169.15
12	Tapung Hilir	-	16	1.013.56
13	Bangkinang Kota	2	2	177.18
14	Bangkinang	2	7	253.50
15	Kampar	1	17	136.28
16	Kampa	-	9	173.08
17	Rumbio Jaya	-	7	76.92
18	Kampar Utara	-	8	79.84
19	Tambang	-	17	371.94
20	Siak Hulu	-	12	689.80

1	2	3	4	5
21	Perhentian Raja	-	5	111.54
Jumlah		8	242	11.289.28

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka.2017

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar Memiliki 250 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan. Dimana Kecamatan yang memiliki Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Tapung dengan jumlah 25 Desa/Kelurahan dan paling sedikit yaitu Kecamatan Bangkinang Kota dengan jumlah 4 Desa/Kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11,289.28 km² atau sekitar 11,62% dari luas wilayah Provinsi Riau (94.561,60 km²). Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365,97 km², sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yakni 76,92 km².

4.1.6. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Guna meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai. Aspek pendidikan merupakan satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Maka untuk meningkatkan dan untuk mempertahankan tingkat pendidikan dan nilai-nilai budaya dilakukan penanaman nilai secara intensif.

Sesuai dengan amanah undang-undang dasar dan undang-undang pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Kampar sejak 2007 lalu sudah mengalokasikan anggaran diatas 20% dari anggaran APBD, hal ini digunakan untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan guru dan peningkatan kesejahteraan guru. Demi pemerataan dibidang pendidikan, semua kecepatan memiliki prioritas yang sama. Ini dapat dilihat dengan banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang tersebar rata disetiap kecamatan.

Berikut ini dapat kita lihat jumlah sekolah negeri/swasta di Kabupaten Kampar pada tabel IV.4,sebagai berikut :

Tabel IV.4
Jumlah Sekolah Negeri/Swasta
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	453	34	487
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	99	29	128
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	40	10	50
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	9	17	26
Jumlah		601	90	691

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka.2017

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memiliki keseriusan terhadap bidang pendidikan, dimana sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Kampar baik itu negeri maupun swasta saat ini berjumlah 691 yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebanyak 487 Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 128 Sekolah, Sekolah Menengah

Atas (SMA) sebanyak 50 Sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 26 Sekolah.

Dibidang pendidikan agama, perhatian pemerintah juga sangat besar hal ini sesuai dengan keinginan bupati Kampar yang menginginkan pendidikan moral dan ahklak juga prioritas yang sangat penting. Madrasah Ibtidaiyah (Mi), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) dan pondok pesantren tumbuh subur yang merupakan pendidikan dibawah Departemen Agama.

Berikut ini dapat kita lihat jumlah sekolah agama negeri/Swasta di Kabupaten Kampar pada tabel IV.5, sebagai berikut :

Tabel IV.5
Jumlah Sekolah Agama Negeri/Swasta
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Sekolah Agama	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Madrasah Ibtidaiyah (Mi)	1	28	29
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	9	75	84
3	Madrasah Aliyah (MA)	3	45	48
Jumlah		13	148	161

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka.2017

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa, jumlah sekolah agama di Kabupaten Kampar baik itu negeri maupun swasta berjumlah 161, dimana terdiri dari madrasah ibtidayah (Mi) sebanyak 29 sekolah, madrasah tsanawiyah (MTS) sebanyak 84 sekolah dan madrasah aliyah (MA) sebanyak 48.

Selain itu, di Kabupaten Kampar memiliki 3 (tiga) perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Universitas Tuanku Tambusai (UT) dan Kampus Politeknik Kampar.

4.1.7. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini sudah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain penyediaan berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, dll.

Berikut ini dapat kita lihat jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Kampar pada tabel IV.6, sebagai berikut :

Tabel IV.6
Jumlah Sarana Kesehatan
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah sakit	6
2	Pukesmas	31
3	Pukesmas Pembantu	184
4	Pukesmas Keliling	22
5	Posyandu	700
Jumlah		943

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka.2017

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa, Sarana kesehatan yang dimiliki hingga saat ini di Kabupaten Kampar berjumlah 943, dimana terdiri dari 6 unit Rumah Sakit (RS), 31 Unit Puskesmas, 184 Unit Puskesmas Pembantu dan 22 Unit Puskesmas Keliling, 700 Unit Posyandu.

Selain fasilitas kesehatan, Pemerintah Kampar juga mempersiapkan tenaga medis seperti Dokter, Bidan dan Perawat. Berikut ini dapat kita lihat jumlah tenaga medis di Kabupaten Kampar pada tabel IV.7, sebagai berikut :

Tabel IV.7
Jumlah Tenaga Medis
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	86
2	Dokter Spesialis	52
3	Dokter Gigi	39
4	Bidan	823
5	Perawat	729
Jumlah		1.729

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka.2017

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa, saat ini Kabupaten Kampar memiliki tenaga medis berjumlah 1.729 dimana terdiri dari 86 orang Dokter Umum, 52 orang Dokter Spesialis, 39 orang Dokter Gigi, 823 orang bidan, 729 orang tenaga perawat yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar.

4.1.8. Agama

Sesuai dengan falsafah Negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan Negara.

Berikut ini dapat kita lihat jumlah rumah ibadah di Kabupaten Kampar pada tabel IV.8, sebagai berikut :

Tabel IV.8
Jumlah Rumah Ibadah
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	698
2	Mushola	1.081
3	Gereja	222
Jumlah		2.001

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka. 2017

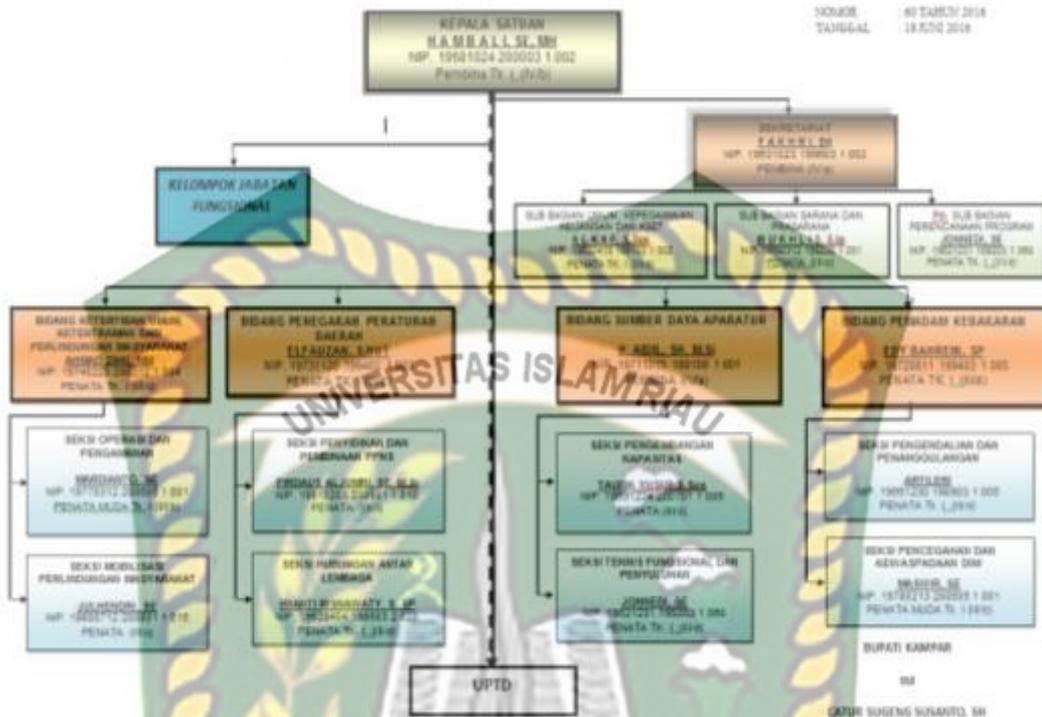
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk Kabupaten Kampar memeluk Agama Islam dan Kristen, hal itu dibuktikan dengan adanya sarana ibadah Masjid/Mushalla untuk umat Islam dan Gereja untuk umat Kristen. Dimana rumah ibadah tersebut berjumlah 2.001, terdiri dari 698 Masjid, 1.081 Mushalla, dan 222 Gereja.

Perbedaan tersebut mereka hidup saling rukun dan damai tanpa adanya perpecahan belah yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun perbedaan agama didalam keseharian, namun perbedaan itu dijadikan sebagai kekuatan dalam membangun Kabupaten Kampar.

4.1.9. Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar

Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Bidang Pemadam Kebakaran tergabung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Gambar IV.2
Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar



Sumber : Kantor Satpol PP Kab. Kampar. 2019

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan kegiatan di bidang pemadam kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas dan fungsi :

- k. Mengkoordinasikan dan mengendalikan bidang pemadam kebakaran dalam pelaksanaan sebagai tugas penanggulangan kebakaran dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar;
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja bidang pemadam kebakaran;
- m. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana bidang pemadam kebakaran;
- n. Mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum dan menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pemadam kebakaran;
- o. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitas/sarana/kebutuhan bidang pemadam kebakaran;

- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di dalam bidang tugasnya;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan secara lisan maupun tulisan;
- s. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 dan SKP;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang pemadam kebakaran dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu

1. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan.
2. Kepala Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini.

Seksi pengendalian dan penanggulangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pengendalian dan penanggulangan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan perjalanan tugas;
- d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran;
- e. Menyusun dan mengatur pola rencana pencegahan dan pemadaman dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda;
- f. Melakukan koordinasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran;
- g. Melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- h. Memberikan bantuan penanggulangan pemadam serta bencana lainnya yang menimpa daerah lain dengan ketentuan berlaku;
- i. Melaksanakan tugas-tugas pengamanan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya yang bersifat preventif maupun represif;

- j. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran;
- k. Mengumpulkan data dilingkup pemadam dan penanggulangan kebakaran;
- l. Melaksanakan penyuluhan dan petunjuk teknis kepada masyarakat luas dan dinas/instansi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- m. Melaksanakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran yang meliputi penyiapan rumusan kebijakan dana fasilitas pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- n. Menginventarisir, pemeliharaan dan pengawasan sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
- o. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- p. Melaksanakan teknis bagian pengendalian dan penanggulangan kebakaran;
- q. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 dan SKP;
- r. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan;

Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Dinidipimpin oleh sorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan dan kewaspadaan dini. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancer dan tertib;
- c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan perjalanan tugas;
- d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Pencegahan dan Kewaspadaan Dini.
- e. Menyiapkan tim penyuplai bahan sebagai komponen pendukung operasi pencegahan dan pemadaman penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- f. Menyipakan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran;
- g. Memberdayakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkup pemadaman kebakaran;
- h. Melaksanakan pemadaman, pencegahan dan kewaspadaan dini terjadinya kebakaran yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan

- dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dan dalam rangka pemadaman kebakaran;
- i. Melaksanakan dan menyusun rencana kebutuhan dan peralatan teknis dan sarana operasional dalam menanggulangi kebakaran dan bencana lain di wilayahnya;
 - j. Mengkoordinasikan dan mengembangkan jaringan kemitraan urusan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - l. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan di Sub Bidang Pencegahan dan Kewaspadaan Dini;
 - m. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 dan SKP;
 - n. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai perintah atasan;

Tabel IV.9
Daftar Urutan Kepegawaian Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	<u>Edy Bahrein, SP</u> Nip. 19720811 199403 1 005	Penata TK. I (III/d)	Kabid Damkar
2	<u>Artileri</u> Nip. 19661230 198903 1 005	Penata TK. I (III/d)	Kasi Pengendalian dan Penanggulangan
3	<u>Maswir, SE</u> Nip. 19621231 199203 1 060	Penata Muda TK. I (III.b)	Kasi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini
4	<u>Rio Kusuma</u> Nip. 19820720 200701 1 001	Pengatur Muda TK.I (II.b)	Danton
5	<u>Rusdi Amri</u> Nip. 19740803 201001 1 002	Pengatur Muda (II.a)	Danton
6	<u>Darman</u> Nip. 19760521 201001 1 001	Pengatur Muda (II.a)	Danton
7	<u>Budi Hidayat</u> Nip. 19780711 201001 1 002	Pengatur Muda TK.I (II.b)	Danru
8	<u>Azwir</u> Nip. 19660714 200801 1 009	Pengatur Muda (II.a)	Danru

Sumber : Bidang Damkar Kabupaten Kampar, 2018

Berdasarkan data diatas, dari seluruh anggota Damkar di Kabupaten Kampar yang berjumlah sebanyak 65 orang yang merupakan PNS berjumlah 8 orang, yang terdiri dari Kabid Damkar, Kasi Pengendalian dan Penanggulangan, Kasi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini, 2 Danton, 2 danru dan 57 orang anggota lainnya tenaga lepas harian.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.2. Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran

Kapabilitas merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan atau Pemerintah Daerah didalam menjawab berbagai tuntutan, tantangan dan kebutuhan pembangunan disertai dengan penyelenggaraan pemerintah dalam pencapaian tujuan bersama yang telah ditentukan.

Penelitian ini menjelaskan tentang kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kapabilitas pemerintah tersebut dilihat dari dimensi kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, teknis, implementasi kebijakan yang tepat dan kepemimpinan.

4.2.2.1. Kapabilitas Kelembagaan (*Institutional Capability*)

Kelembagaan Pemadam Kebakaran harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas. Tugas dan tanggung jawab damkar dalam melayani dan melindungi masyarakat hanya akan maksimal bila dilaksanakan oleh sebuah dinas yang mandiri di daerah Kapabilitas kelembagaan merupakan salah satu unsur yang terpenting di dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran.

Maksud dari kelembagaan disini adalah dimana pemerintah beserta perangkatnya mempunyai kemampuan kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar. Memiliki struktur organisasi, peran, tugas tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking dengan semua level pemerintah merupakan pengaturan kelembagaan yang efektif dan tepat.

Di Kabupaten Kampar Pemadam Kebakaran adalah sebuah Bidang yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Melihat dari perspektif sisi aturan Bidang Pemadam Kebakaran memang terletak di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar yang dulunya bergabung dengan BPBD. Hadirnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membuat Pemadam Kebakaran dipisahkan dari BPBD. Hal itu didasari UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa BPBD harus berdiri sendiri. Inilah mengakibatkan Damkar harus terpisah dari BPBD dan bergabung dengan Satpol PP.

Memiliki luas wilayah yang begitu luas, kepadatan penduduk, disertai memiliki titik kerawanan kebakaran, dan beberapa aktifitas pusat pertumbuhan ekonomi yang padat. Membuat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar belum mampu menjadi sebuah organisasi tersendiri dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Melihat dari volume kerja luas wilayah yang harus dilayani sebaiknya Damkar dan Satpol PP harus dipisahkan, karena kita punya 21 Kecamatan dengan titik kerawanan kebakaran hampir 18 unit seperti kepadatan penduduk dan beberapa pusat pertumbuhan ekonomi. Alasan kenapa Damkar sampai sekarang ini belum bisa berdiri sendiri di Kabupaten Kampar karena berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 kita belum memiliki cantolan itu, karena untuk menjadikan sebuah dinas kita harus memiliki beberapa indikator menjadi penilaian berdasarkan beberapa variabel.⁶⁹

Penggabungan Pemadam Kebakaran dengan Satpol PP saat ini memang kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, mengingat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang berbeda. Seperti diketahui pemadam kebakaran mempunyai tupoksi dalam menanggulangi kebakaran, sementara itu Satpol PP mempunyai tupoksi penegak Peraturan Daerah.

Disamping itu adanya 5 (lima) Wilayah yang harus dijangkau oleh pemadam kebakaran di Kabupaten Kampar dengan kondisi 1 (satu) posko utama yang terletak di Ibu Kota Kabupaten yaitu Bangkinang. Berikut ini dapat kita lihat Wilayah kerja Damkar di Kabupaten Kampar pada Tabel IV.10, sebagai berikut :

Tabel IV. 10
Wilayah Kerja Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar
Tahun 2019

No	Wilayah	Kecamatan
1	2	3
1	Wilayah I	1. Kecamatan Bangkinang Kota 2. Kecamatan Bangkinang 3. Kecamatan Salo 4. Kecamatan Kampar

⁶⁹ Wawancara dengan Kabag Organisasi Kabupaten Kampar Samsurijal, Senin 15 April 2019 di Kantor Bupati Kampar

1	2	3
2	Wilayah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tapung 2. Tapung Hulu 3. Tapung Hilir
3	Wilayah III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan XIII Koto Kampar 2. Kecamatan Koto Kampar Hulu 3. Kecamatan Kuok
4	Wilayah IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kampar Timur 2. Kecamatan Tambang 3. Kecamatan Rumbio Jaya 4. Kecamatan Kampar Utara
5	Wilayah V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Siak Hulu 2. Kecamatan Kampar Kiri 3. Kecamatan Perhentian Raja 4. Kecamatan Kampar Kiri Hulu 5. Kecamatan Kampar Kiri Hilir 6. Kecamatan Kampar Kiri Tengah 7. Kecamatan Gunung Sahilan

Sumber : Kantor Damkar Kabupaten Kampar. 2019

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Penggabungan Damkar dengan Satpol PP kurang pas, karena Satpol PP dan Damkar memiliki tupoksi yang berbeda. dimana Satpol PP memiliki tupoksi mengenai penegakan aturan dan Damkar memiliki tupoksi mengenai masalah kebakaran, artinya ada terjadi dalam satu organisasi memiliki dua tupoksi. Oleh karena itu, biar lebih pasnya dalam pelaksanaan tugas Damkar ini kedepannya seharusnya Damkar dan Pol PP menurut saya dipisah dan Damkar menjadi OPD tersendiri. Agar nantinya Damkar sendiri dapat membentuk Posko Kebakaran berdasarkan zona Wilayah mengingat luasnya wilayah di Kabupaten Kampar.⁷⁰

Sudah seharusnya, Damkar di Kabupaten Kampar menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh Damkar dalam menanggulangi kebakaran. Dengan adanya OPD tersendiri Damkar dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya, didalam

⁷⁰ Wawancara dengan Kasat Pol PP Hambali, Senin 08 April 2019 di Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar

Peraturan Menteri telah diatur mengenai waktu tanggap (*response time*) di Wilayah Indonesia. *Response time* merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian kebakaran yang mungkin terjadi di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Untuk memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan, seharusnya Damkar di Kabupaten Kampar harus menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri dalam bentuk Dinas/Badan. Bertujuan agar kita bisa membangun Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan (P2K) sehingga kita dapat menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kampar ini. Di dalam Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, waktu tanggap standar untuk kondisi kebakaran adalah kurang dari 15 Menit.⁷¹

Sebagai sebuah organisasi yang difungsikan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat terhadap kebakaran. Dalam kondisi saat sekarang ini pemadam kebakaran harus dekat dengan masyarakat sehingga keberadaanya sangat dirasakan oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kondisi saat sekarang ini keberadaan pemadam kebakaran di Kabupaten Kampar belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Damkar Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Kondisi satu posko induk Damkar yang kita miliki, dengan posisi berada di Ibu Kota Kabupaten (Bangkinang) menurut saya itu sangat tidak lazim sekali. Luasnya wilayah Kabupaten Kampar tidak sepatutnya Damkar memiliki satu posko induk saja, hal ini sangat berdampak sekali terhadap kinerja kami dilapangan. Hal itu terlihat ketika kami datang ketempat kejadian kebakaran yang jauh dari lokasi posko, kedatangan kami membuat masyarakat menjadi marah dan kesal akibat keterlambatan kami

⁷¹ Wawancara dengan Kabid Damkar Edy Bahrein, Rabu 10 April 2019 di Kantor Damkar Kabupaten Kampar

datang. Besar harapan kami agar Pemerintah dapat membentuk Posko Damkar di tiap wilayah yang ada di Kabupaten Kampar.⁷²

Kurang optimalnya kerja Damkar berakibat buruk terhadap masyarakat, salah satunya saat kejadian kebakaran yang melanda Pasar Sabtu Lipat Kain Tahun 2016. Kebakaran ini menghanguskan 20 kotak kios permanen dan semi permanen. Hal ini tidak terlepas dari keterlambatan petugas damkar sampai ke lokasi mengingat jarak tempuh dari posko induk ke Pasar Lipat Kain cukup jauh.

Berdasarkan wawancara dengan korban kebakaran di Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Saat kejadian kebakaran Pasar Sabtu Lipat Kain pada malam hari, warga pada saat itu hanya mengandalkan peralatan seadanya saja. Hal itu dikarenakan petugas Damkar terlambat datang ke lokasi kejadian dan api pun sudah mulai membesar membakar satu persatu kios pedagang. Sehingga warga dan pedagang pun tak mampu menyelamatkan barang-barang mereka miliki yang ada didalam kios tersebut. Kejadian tersebut mengakibatkan banyak barang yang terbakar dan pedagang mengalami kerugian ratusan juta rupiah.⁷³

Dalam konteks kejadian ini, setelah terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik mengakibatkan sebagian kondisi Pasar Lipat Kain ludes habis di lalap sijago merah pada saat itu. Dengan kekompakan masyarakat, LSM dan Ninik Mamak di Kenegarian Lipat Kain Kec. Kampar Kiri, akhirnya mencari solumsi/tindakan cepat dengan membeli 1 (satu) Unit mobil Damkar yang dibeli dengan swadaya masyarakat dan biaya operasional oleh swadaya masyarakat disertai bantuan dari beberapa perusahaan yang ada di Kec. Kampar Kiri

⁷² Wawancara dengan anggota Damkar Hendri Nur Efendi, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar Kabupaten Kampar

⁷³ Wawancara dengan korban kebakaran Kariman, Senin 17 Juni 2019 di Kantor Lurah Lipat Kain.

Kejadian diatas tidak terlepas dari lambannya gerak dan peran damkar mengingat posko induk Damkar ke lokasi memakan waktu yang cukup lama, untuk itu pemerintah harus segera mengambil tindakan memisahkan Damkar dari Satpol PP dan menjadikannya OPD tersendiri. Sehingga apabila hal yang sama terulang kembali, Damkar dapat bergerak dengan cepat ke lokasi kejadian karena Pos Damkar sudah ada di Kecamatan.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa:

Sebagai anggota legislatif dalam menyampaikan aspirasi dan harapan dari masyarakat banyak di Kabupaten Kampar. Agar efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi damkar sesungguhnya seharusnya untuk di Kabupaten Kampar sendiri damkar harus menjadi bagian tersendiri dalam menjalankan tugasnya. untuk itu kita perlu menindak lanjuti kinerja damkar kedepannya seperti apa, dan yang pasti salah satu tindakan yang paling tepat adalah Damkar dapat berdiri sendiri dan memiliki Pos Damkar setiap Kecamatan untuk mengantisipasi dan meminimalisir saat kebakaran terjadi.⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penggabungan Bidang Pemadam Kebakaran ke Satuan Polisi Pamong Praja kurang pas dan untuk optimalnya pelaksanaan pekerjaan pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran seharusnya pemadam kebakaran di Kabupaten Kampar harus berdiri sendiri menjadi OPD. Hal itu mengingat luas wilayah dan jarak tempuh yang ada, hal ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan pemadam kebakaran sesuai dengan harapan masyarakat.

⁷⁴ Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Kampar

4.2.2.2. Kapabilitas Sumber Daya Manusia (*Human Resource Capability*)

Keterbelakangan suatu organisasi pada umumnya dilatar belakangi oleh minimnya kemampuan SDM yang terlibat didalamnya, baik aspek manajerial maupun pada aspek organisasional. Memiliki SDM yang profesional disertai dengan intruksi pekerjaan yang jelas, dan memiliki skill/kualitas personel dengan baik adalah upaya peningkatan kemampuan SDM dalam menciptakan organisasi yang lebih baik sehingga mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai.

Berikut ini dapat kita lihat Personel Pemadam Kebakaran menurut Pendidikan dan Pangkat/Golongan di Kabupaten Kampar, pada tabel IV.11 sebagai berikut :

Tabel IV.11
Personel Pemadam Kebakaran menurut Pendidikan dan Pangkat/Golongan Di Kabupaten Kampar

No	Uraian	Jumlah
1	Pendidikan	
	a. SD	-
	b. SMP	-
	c. SMA	56
	d. Diploma	2
	e. S1	10
Jumlah		68
2	Pangkat/Golongan	
	a. Golongan 1	-
	b. Golongan II	5
	c. Golongan III	3
	d. Golongan IV	-
	e. Non PNS	60
Jumlah		68

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kampar. 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pendidikan personel pemadam kebakaran Kabupaten Kampar yaitu SMA sebanyak 56 Orang, Diploma sebanyak 2 Orang dan S1 sebanyak 10 Orang. Berdasarkan Pangkat/Golongan yaitu Golongan II sebanyak 5 Orang, Golongan III sebanyak 3 Orang dan Non PNS sebanyak 60 Orang. Sedangkan Jabatan Esselon III sebanyak 1 Orang, Esselon IV sebanyak 2 Orang, Danton sebanyak 3 Orang, Danru sebanyak 6 Orang dan Anggota sebanyak 56 Orang.

Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran adalah menghadirkan Sumber Daya Manusia, hal ini merupakan faktor menentukan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dalam memberikan pelayanan terhadap korban kebakaran. Oleh karena itu, untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang memadai Pemerintah selalu hadir dan berupaya memberikan kesempatan bagi anggota yang memiliki kemampuan, skill dan potensial untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Untuk SDM pimpinan Damkar yang kita punya cukup bagus. Hal itu terlihat apabila ada pelatihan dan pembekalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pasti kita selalu memerintahkan salah satu personel untuk mengikuti pelatihan tersebut. Tujuannya kedepan agar Sumber Daya Manusia pada Bidang Damkar yang kita punya benar-benar menguasai pengetahuan yang baik tentang kebakaran seperti Pengendalian, Pencegahan, Penanggulangan, dll. Sehingga kita persiapan bisa untuk menjadi instruktur bagi anggota pemadam kebakaran kita kedepannya.⁷⁵

Sesuai dengan salah satu Misi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 yaitu menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional. Maka untuk

⁷⁵ Wawancara dengan Kasat Pol PP Hambali, Senin 08 April 2019 di Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar

menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional dalam Damkar adalah dengan memberikan bimbingan serta pelatihan langsung kepada seluruh personil yang ada di dalam Damkar tersebut. Dari bimbingan dan pelatihan tersebut keseluruhan personil bisa belajar dan memahami apa kelebihan dan kekurangannya selama ini.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Untuk kondisi sekarang ini SDM anggota Damkar yang kita miliki masih jauh dari harapan kita, baik itu dari skill dan kualitas yang dimiliki. Hal ini disebabkan dengan keuangan yang kita miliki terbatas untuk mengembangkan potensi/skill anggota. Disamping itu rekrutmen yang kita lakukan bukan melakukan rekrutmen tersendiri, melainkan rekrutmen anggota Satpol-PP dan sebagai anggota Satpol-PP yang terpilih melalui rekrutmen nantinya akan diperbantukan ke Damkar, sehingga kita tidak menemukan anggota Damkar yang sesuai di harapkan.⁷⁶

Memiliki Skill/Potensi merupakan keinginan dari setiap anggota damkar di Kabupaten Kampar. Ilmu anggota pemadam kebakaran bukan hanya sebatas memadam api saja melainkan bagaimana memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran. Banyaknya jumlah anggota pemadam kebakaran yang ada, membuat tidak semua anggota damkar di Kabupaten Kampar bisa diikuti sertakan dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Damkar Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Sebenarnya anggota damkar disini memiliki harapan besar untuk bisa mengikuti pelatihan. Karna banyaknya jumlah anggota damkar yang kita miliki, sedangkan permintaan untuk ikut pelatihan tersebut hanya 2-3 orang. Sehingga dari kami anggota damkar yang ikut itu berdasarkan

⁷⁶ Wawancara dengan Kabid Damkar Edy Bahrein, Rabu 10 April 2019 di Kantor Damkar Kabupaten Kampar

penilaian dari pimpinan. Berdasarkan mana yang bagus dan berkompenten maka itulah yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan.⁷⁷

Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang professional adalah terletak pada proses rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik dan memilih orang yang memenuhi syarat. Proses rekrutmen anggota Damkar juga harus memiliki SOP yang tepat. Namun sangat disayangkan sampai saat sekarang ini Bidang Damkar belum memiliki SOP sebagai acuan melakukan rekrutmen anggota Damkar.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Meskipun perekrutan anggota Damkar ini adalah sebagian dari anggota Satpol PP, kita berharap hendaknya orang yang dipilih tersebut memiliki skill dan kualitas yang tepat, berani mengambil resiko dan cekatan dalam bertindak. Jangan karena Satpol PP dengan Damkar ini satu kantor, untuk rekrutmen kita asal-asalan saja dan berpikir bahwa anggota Satpol PP yang ditarik sudah memenuhi kualifikasi.⁷⁸

Tujuan dilakukannya rekrutmen anggota Damkar, agar semua anggota Damkar yang terpilih memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Kualifikasi atau kriteria petugas Damkar seperti berani mengambil resiko, cekatan, aktif, energik dan lain-lainnya. Petugas Damkar yang tidak professional akan memperburuk situasi pada saat kebakaran terjadi. Skil yang tidak ada sama sekali membuat petugas Damkar yang turun kelapangan gelagapan dan bingung dengan tindakan pertama yang harus dilakukan.

⁷⁷ Wawancara dengan anggota Damkar Hendri Nur Efendi, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar Kabupaten Kampar

⁷⁸ Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat korban kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa:

Saat rumah saya kebakaran, saya melihat ada beberapa orang petugas Damkar yang kurang cekatan dalam bekerja, petugas damkar hanya berkumpul disatu titik saja, seperti masih bingung mau ambil tindakan apa, sementara itu api sudah mulai menyebar keseluruh rumah. Disitu saya menilai masih lemahnya tindakan dan keberanian anggota Damkar dalam mengambil keputusan di lapangan.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, SDM untuk anggota pemadam kebakaran masih jauh dari harapan dan SDM pimpinan Damkar cukup bagus, karena selalu diikutkan pelatihan/pembekalan yang nantinya dipersiapkan untuk instruktur bagi anggota pemadam kebakaran. Pada rekrutmen terhadap anggota pemadam kebakaran belum dilakukan secara tersendiri melainkan rekrutmen gabungan dengan Satpol PP dan nantinya sebagian diperbantukan ke pemadam kebakaran.

4.2.2.3. Kapabilitas Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Capability*)

Kapabilitas Implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga kegiatan/aktivitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Kapabilitas ini dapat dinilai dari ketersediaan kebijakan, aturan, dan peraturan yang tepat untuk membuat keputusan dan memobilisasi sumber daya serta melibatkan organisasi publik dan swasta terkait Implementasi kebijakan

⁷⁹ Wawancara dengan korban kebakaran Muzakat, Rabu 22 Mei 2019 di Gubuk Kecamatan Tapung

merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Adanya regulasi atau kebijakan merupakan sebuah acuan dan pedoman bagi anggota pemadam kebakaran dilapangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Tindakan dan keputusan yang diambil dilapangan harus didasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh instansi yaitu Bidang pemadam kebakaran sehingga masyarakat yang dilayani tidak merasa dirugikan maupun dikecewakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Semenjak adanya Damkar mulai bergabung dengan Dinas Sosial, BPBD dan Satpol PP untuk sampai sekarang ini Damkar Kabupaten Kampar belum memiliki Peraturan Bupati tersendiri terkait pemadam kebakaran ini. Tapi dalam waktu dekat ini Bidang Pemadaman Kebakaran Kabupaten Kampar sudah mulai menyusun/membuat Peraturan Bupati. Kita sekarang sudah mulai berbenah diri dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan Damkar yang selama ini selalu mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya.⁸⁰

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan membantu damkar untuk mempertahankan kualitas control dan menjaga proses-proses pada instansi untuk tetap stabil. Dengan adanya SOP semua kegiatan instansi akan dapat terkontrol dan target yang ingin dicapai dapat terwujud. Kelemahan yang terjadi pada saat sekarang ini di Bidang Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar adalah belum adanya SOP yang jelas terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kebakaran.

⁸⁰ Wawancara dengan Kasat Pol PP Hambali, Senin 08 April 2019 di Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Pemadam kebakaran sampai saat sekarang ini belum memiliki Standar Operasioanl Prosedur (SOP) dan regulasi dalam penanggulangan kebakaran. Ini merupakan kelemahan kita selama ini dalam menangani kebakaran dilapangan karena tidak memiliki pedoman/panduan kerja terhadap anggota dilapangan. Tetapi sekarang ini kita sudah mulai membuat regulasi terkait penanggulangan kebakaran dan kita sudah mulai melakukan koordinasi kebeberapa daerah yang telah membuat peraturan-peraturan dan SOP terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.⁸¹

Begitu juga dengan regulasi di Bidang Damkar. Pemerintah harus segera bergerak cepat membuat peraturan dan SOP Damkar sehingga petugas memiliki payung hukum sebagai acuan untuk bertindak dalam menjalankan tugasnya. Gerak pemerintah yang lamban akan ikut mempengaruhi eksistensi Damkar di mata masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Sejauh ini dari kami DPRD belum ada menerima pembahasan yang dilakukan terkait regulasi terhadap penanggulangan kebakaran di Kab. Kampar karena belum adanya koordinasi sampai saat sekarang ini. Tapi menurut saya perlu adanya regulasi tersebut agar anggota Damkar yang bekerja dilapangan memiliki payung hukum dalam mengambil tindakan atau keputusan.⁸²

Pentingnya pemerintah untuk segera membuat kebijakan akan berdampak terhadap masyarakat. Salah satunya sikap cepat dan tanggap pemerintah untuk memberikan bantuan dan santunan kepada korban kebakaran. Dengan adanya

⁸¹ Wawancara dengan Kabid Damkar Edy Bahrein, Rabu 10 April 2019 di Kantor Damkar Kabupaten Kampar

⁸² Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Kampar

bantuan dari pemerintah akan meringankan beban yang dialami korban baik itu meringankan beban berupa moril maupun materil.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat korban kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa:

Alhamdulillah kami sudah menerima bantuan maupun santunan dari pemerintah, kami merasa senang pemerintah cepat sekali tanggap terhadap musibah yang kami alami. Kami mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 5000.000,00- dan barang sembako lainnya. Dan kami juga berharap kedepannya pemerintah bisa membuat kebijakan berupa bantuan perbaikan rumah atau setidaknya bantuan bangunan rumah semi permanen, jadi ketika rumah kami hangus, kami tidak malu terlalu lama menumpang sama tetangga atau sanak saudara.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Kebijakan di Kabupaten Kampar belum berjalan optimal hal ini masih ditemukan belum memiliki Peraturan Bupati (Perbub) dan Standar Operasional Kebakaran (SOP) dalam penanggulangan kebakaran. Disamping itu telah melakukan upaya koordinasi kebeberapa Daerah yang telah menjadikan Damkar sebagai OPD tersendiri untuk mendapatkan sebuah pedoman/acuan dalam pembuatan Perbub dan SOP.

4.2.2.4. **Kapabilitas Keuangan (*Financial Capability*)**

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan kapabilitas keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien tanpa anggaran/modal yang cukup untuk memberikan pelayanan dan maupun pelaksanaan pembangunan. Disamping itu keuangan juga merupakan hal paling dasar didalam menentukan

⁸³ Wawancara dengan korban kebakaran Supardi, Jum'at 24 Mei 2019 di Warung Kopi Kecamatan Kampa

sebuah tolak ukur kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mempunyai anggaran keuangan yang memadai yang dapat mendukung segala aktivitas ataupun kegiatan, dalam hal ini terkait dengan meningkatkan dan mendukung kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar juga butuh keuangan yang tidak sedikit.

Berikut ini dapat kita lihat jumlah anggaran keuangan pada bidang pemadam kebakaran Kabupaten Kampar tahun 2019, pada tabel IV.12 sebagai berikut :

Tabel IV.12
Anggaran Keuangan Pada Bidang Pemadam Kebakaran
Di Kabupaten Kampar Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Kegiatan	Anggaran
1	2017	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.	Rp. 975.233.755,00
2	2018	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Rp. 915.522.880,00
3	2019	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Rp. 841.757.235,00

Sumber : DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja. 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar memiliki penurunan anggaran kegiatan pada tiga tahun terakhir untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

Peran Damkar begitu strategis dalam proses pembangunan daerah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya anggaran bagi pemadam kebakaran, lantaran tidak menempatkan Damkar sebagai skala prioritas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pihak eksekutif dan legislatif masih memandang pemadam kebakaran hanya beban dalam distribusi anggaran.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Memang pada saat sekarang ini, kita mengalami defisit anggaran keuangan di Kab. Kampar. Anggaran keuangan yang kita miliki tidak seperti dahulunya, sehingga berdampak terhadap pemangkasan anggaran di setiap OPD di Kab. Kampar. Jadi program-program pemerintah yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat kita kurangi. Pemangkasan keuangan di Damkar hanya kami lakukan terhadap anggaran perjalanan dinas, belanja bahan habis pakai, dan lain-lainnya. Akibat minimnya anggaran yang ada, kita belum bisa memperjuangkan dan menambah anggaran kesejahteraan untuk anggota Damkar.⁸⁴

Pemadam kebakaran merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi dalam memadamkan api bahkan berakibat cacat seumur hidup apabila tidak hati-hati dalam bekerja. Tingginya resiko pekerjaan yang dilakukan oleh petugas berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan anggota dilapangan. sayangnya hingga kini di Kabupaten Kampar belum ada menganggarkan asuransi kecelakaan kerja dan kematian untuk petugas pemadam kebakaran.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

⁸⁴ Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Kampar

Dengan keterbatasan keuangan yang kita miliki kita belum bisa menganggarkan asuransi kecelakaan kerja bagi anggota damkar. Malah sampai saat ini asuransi pun dimandirikan (Pribadi), gaji mereka yang dipotong untuk bayar BPJS bukan dari tanggungan Pemerintah Daerah. Meskipun begitu, kami terus berkoordinasi dengan pimpinan yaitu Bupati dan Sekda berupaya agar biaya perlindungan asuransi untuk petugas pemadam kebakaran dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB).⁸⁵

Selain itu, dengan kondisi keuangan daerah di Kabupaten Kampar yang sangat terbatas pada saat sekarang ini tentu juga berdampak terhadap penerimaan uang insentif atau uang lelah bagi anggota pemadam kebakaran dilapangan. uang insentif atau uang lelah yang diterima oleh anggota pemadam kebaran dilapangan tidak sesuai dengan tingkat/beban resiko pekerjaan dilapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar. beliau mengatakan bahwa :

Anggaran Bidang Pemadam Kebakaran yang kita punya masih jauh dari harapan (Milyaran), malah kondisi sekarang yang terjadi adalah pemangkasan anggaran. Mengingat besar biaya operasional pemadam kebakaran tidak sesuai dengan anggaran yang kita miliki dan besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh anggota dilapangan tidak sesuai dengan insentif yang mereka terima. Untuk insentif yang mereka terima hanya Rp. 500.000/Bulan. Sehingga ini selalu menjadi keluhan bagi anggota kami dan insyaallah kami berupaya menaikkan uang insentif bagi anggota damkar, kalau perlu dibayarkan berdasarkan turun kelapangan bukan perbulan agar kesejahteraan anggota damkar bisa kita wujudkan.⁸⁶

Kesejahteraan merupakan hak yang ingin dimiliki oleh setiap individu. Kesejahteraan menunjukkan dimana kondisi manusia dalam keadaan makmur dan dapat memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan yang didapat oleh petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Kampar belum sesuai yang diharapkan.

⁸⁵ Wawancara dengan Kasat Pol PP Hambali, Senin 08 April 2019 di Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar

⁸⁶ Wawancara dengan Kabid Damkar Edy Bahrein, Rabu 10 April 2019 di Kantor Damkar Kabupaten Kampar

Hal ini dapat dilihat mininnya uang insentif mereka diterima dan gaji dibawah UMK Kabupaten Kampar, disamping itu tidak adanya jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap anggota damkar, Padahal mereka siap meninggalkan keluarga untuk siaga 24 jam demi pengabdian masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Damkar Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Uang isentif atau uang lelah yang kami diterima hanya Rp. 500.000/Bulan, disamping itu gaji kami hanya Rp. 1.500.00 /Bulan itupun dibawah standar UMK Kabupaten Kampar Rp. 2.719.000/Bulan. Menurut saya masih kurang dengan apa yang kami kerjakan bersama rekan-rekan dilapangan. Saya berharap kedepanya Pemerintah Kabupaten Kampar dapat meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan kami selaku anggota Damkar dan disamping itu juga kami berharap pemerintah juga hadir dalam memberikan jaminan kesehatan bagi para anggota Damkar.⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, keuangan Bidang Damkar di Kabupaten Kampar sangat jauh yang diharapkan. Besarnya biaya operasional pemadam kebakaran tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh anggota dilapangan tidak sesuai dengan insentif yang mereka terima. Bidang pemadam kebakaran kedepanya berupaya memberikan keyakinan kepada pimpinan agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap pemadam kebakaran.

4.2.2.5. Kapabilitas Teknis (*Technical Capability*)

Kapabilitas Teknis memiliki sistem logistik, manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin network dengan berbagai stakeholder. Selain itu juga sistem informasi teknologi dan

⁸⁷ Wawancara dengan anggota Damkar Afrizal, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar Kabupaten Kampar

jaringan komunikasi antara organisasi, masyarakat dan perwakilan media haruslah memadai.

Dalam upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas teknis bidang pemadam kebakaran Kabupaten Kampar dalam penanggulangan kebakaran terus melakukan menjalin komuniasi dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Kampar, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan kerjasama dengan media terkait himbauan bahaya kebakaran.

Menjalin sebuah koordinasi yang baik dari berbagai stakeholder itu tidaklah mudah, diperlukan hubungan yang harmonis dan keselarasan diantara satu dengan yang lainnya. Perpaduan karakter dan watak menjadi pembeda disetiap tindakan, maka diperlukan hubungan yang baik agar dapat menimbulkan sebuah komunikasi yang tepat dalam mengambil keputusan maupun tindakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Kabupaten Kampar selalu menjadi salah satu pusat perhatian terkait masalah kebakaran hutan selain Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Riau. Kita Pemerintah Kabupaten Kampar selalu melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri serta melibatkan pengawasan dari masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan/lahan didaerah kita. Apabila didapatkan ada oknum yang mencoba-coba untuk membuat kebakaran hutan maka dari pihak TNI dan Polri tidak segan-segan untuk melakukan penangkapan dan memeberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.⁸⁸

Pentingnya informasi dan pengetahuan serta pemaham masyarakat tentang bahaya kebakaran harus diperhatikan. Semua warga wajib memiliki pengetahuan dasar tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Kesiagaan

⁸⁸ Wawancara dengan Kasat Pol PP Hambali, Senin 08 April 2019 di Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar

kebakaran ini memang sering disosialisasikan oleh pihak Damkar Kab. Kampar, mengingat Daerah Kab. Kampar rawan sekali dengan kejadian kebakaran.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Dalam mengatasi berbagai terjadinya kebakaran di Kabupaten Kampar, kita selalu melakukan himbauan/sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati sebelum meninggalkan rumah seperti mengecek kembali kompor, periksa dan lepaskan alat-alat elektronik yang terpasang dan dilarang melakukan pembakaran jenis apapun di musim kemarau yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Hal ini kita lakukan melalui kerja sama dengan radio swasta/pemerintah yang ada di Kabupaten Kampar untuk selalu memutarakan himbaun tersebut kepada masyarakat dalam pencegahan kebakaran.⁸⁹

Dalam mengantisipasi maraknya terjadi kebakaran, sekaligus menambah wawasan anak-anak sekolah terhadap pengetahuan bahaya kebakaran. Bidang pemadam kebakaran Kabupaten Kampar melakukan kegiatan masuk sekolah, dimana memberikan pengetahuan terhadap anak-anak dan melakukan kegiatan simulasi kebakaran. Hal ini bertujuan agar anak-anak pelajar dapat memahami bagaimana melakukan tindakan pertama apabila terjadi kebakaran yang bersumber dari api atau asap kecil.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Damkar Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran yang terus meningkat di Kabupaten Kampar, kami melakukan kegiatan sosialisasi masuk kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini kami lakukan bertujuan memberikan pengetahuan dan gambaran kepada anak-anak sekolah bagaimana cara memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Baik itu yang bersumber dari api maupun bersumber dari asap kecil.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Artileri, Senin 08 April 2019 di Kantor Damkar Kabupaten Kampar

⁹⁰ Wawancara dengan anggota Damkar Ma'aruf, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar Kabupaten Kampar

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran dan akibat yang ditimbulkan itu sangat penting. Masyarakat tidak harus mengandalkan petugas Damkar saat kebakaran terjadi. Dengan adanya sosialisasi masyarakat akan tahu apa tindakan pertama yang harus dilakukan saat kebakaran terjadi. Sosialisasi ini memiliki tujuan yang jelas agar kedepannya dapat menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran. Informasi ini berupa bahaya kebakaran dan akibat yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Selaku anggota DPRD, saya menyambut baik kegiatan yang dibuat oleh Bidang Damkar dalam kegiatan sosialisasi, Dengan harapan setelah kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran saat ini, masyarakat paham dan akan lebih tanggap lagi dalam menghadapi ancaman bahaya kebakaran yang sekalipun tidak kita harapkan. Lewat kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan berdampak pada kenyamanan masyarakat terhadap Damkar karena dapat maksimal dalam bekerja.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Kabupaten Kampar terus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjaga hutan/lahan agar tidak adanya terjadi kebakaran hutan/lahan, hal ini dilakukan dengan cara melibatkan TNI dan Polri serta partisipasi dan pengawasan dari masyarakat agar kebakaran bisa diminimalisir. Disamping itu selalu melakukan kerjasama dengan media elektronik seperti Radio swasta/pemerintah terkait himbuan kepada masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran.

⁹¹ Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Kampar

4.2.2.6. Kapabilitas Kepemimpinan (*Leadership Capability*)

Kapabilitas Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengelola organisasi dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Kapabilitas kepemimpinan dapat dilihat melalui kemampuan pemimpin, komitmen pemimpin, dan konsisten pemimpin. Kemampuan pemimpin menunjukkan kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan melalui kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual.

Disamping itu, komitmen pemimpin adalah bagaimana pemimpin memberi teladan dengan menyelaraskan antara tindakan dan nilai kebersamaan. Karena itu menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar memerintah dan mempengaruhi bawahan, melainkan perlu tanggap merespons permasalahan organisasi dan memegang komitmen terhadap setiap tindakan maupun keputusan yang diambil.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Kasat Pol PP dan Kabid Damkar yang sekarang ini, selama saya bergabung disini menjadi Kepala Seksi menurut pengamatan saya beliau memiliki jiwa kepemimpinan. Terlihat beliau selalu aktif dan peduli dalam memperjuangkan menyelesaikan berbagai persoalan permasalahan yang ada di Damkar ini. Saat sekarang ini Kabid Damkar berupaya untuk menambah sarana prasarana damkar dan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. disamping itu selalu giat dalam melakukan koordinasi ke beberapa Daerah tetangga untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang nantinya bisa kedepanya kita terapkan di Daerah kita.⁹²

⁹² Wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Artileri, Senin 08 April 2019 di Kantor Damkar Kabupaten Kampar

Sigap, cepat dan tanggap seorang pemimpin dalam menyikapi masalah pekerjaan juga diperlukan, hal ini menjadi sebagai tolak ukur seorang pemimpin dalam menjalankan pekerjaan. Mengingat resiko pekerjaan Damkar yang tinggi, pemimpin yang terpilih harus berani, disiplin, dan kuat menghadapi tantangan.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa:

Untuk posisi kepemimpinan Damkar kita harus memiliki seorang yang tegas dan disiplin, karena Damkar merupakan pekerjaan yang penuh beresiko di lapangan. Melihat kepemimpinan sekarang Kasat Pol PP dan Kabid Damkar kita, menurut saya sudah bagus orangnya. Baik itu penilaian dari segi ilmu, sikap dan loyalitas yang dimilikinya. Hal itu terlihat dibawah kepemimpinan Damkar sekarang, banyak melakukan terobosan-terobosan terkait penanggulangan kebakaran di Kab Kampar dapat diminimalisir meskipun dengan keadaan keuangan yang minim.⁹³

Kepemimpinan tidak terlepas dari sikap disiplin, dan disiplin ini harus dimulai dari diri pemimpin tersebut. Disiplin harus diartikan sebagai “mendidik” untuk perbaikan dan menjadi lebih baik, tetapi tidak diartikan sebagai hukuman bagi anggota yang bersalah.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Damkar Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Kabid Damkar yang sekarang ini orangnya tegas dan disiplin. Karakter yang tegas dan disiplin yang dimilikinya membuat kami anggota damkar tidak bisa bermalasan-malasan baik itu datang ke kantor maupun dalam bekerja. Beliau hadir tepat waktu, datang ke kantor dan dikesempatan apel pagi beliau selalu memberikan motivasi serta arahan maupun petunjuk kepada anggota dalam melakukan setiap pekerjaan.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Kampar

⁹⁴ Wawancara dengan anggota Damkar M. Yunan, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar Kabupaten Kampar

Tugas seorang pimpinan tidak hanya sebagai pengambil keputusan saja, tetapi seorang pemimpin harus disiplin, bertanggung jawab, memberikan motivasi dan lainnya. Pemimpin juga harus memahami dan menangani situasi anggotanya dan mendorong anggotanya untuk dapat bekerja lebih keras, mengatasi konflik-konflik yang ada, dan dapat memberikan kesempatan pada setiap anggotanya untuk mengemukakan pendapat tentang kondisi penting menurut persepsi mereka masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Damkar Kabupaten Kampar, Beliau mengatakan bahwa :

Kabid Damkar dalam bekerja beliau selalu berkoordinasi dengan pimpinan di atas disertai dengan mendengarkan pendapat maupun saran dari kepala seksi bahkan dari anggota sendiri sebelum mengambil sebuah keputusan/tindakan. Disamping itu disela-sela waktu istirahat beliau selalu menyempatkan diri berada ditengah-tengah kita sambil menikmati canda tawa bersama merokok dan ngopi.⁹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas dan disiplin terhadap diri sendiri maupun anggotanya. Dimana dia peduli dan selalu memperjuangkan segala permasalahan yang ada pada Bidang Pemadam kebakaran. Disamping itu memiliki sifat karakter yang tegas dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja dan selalu menyempatkan diri untuk berada ditengah-tengah anggota diwaktu istirahat.

⁹⁵ Wawancara dengan anggota Damkar Rahmad, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar Kabupaten Kampar

4.2.3. Kendala Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran

Kebakaran merupakan kejadian yang tidak diinginkan bagi setiap orang dan kecelakaan yang berakibat fatal. Kebakaran dapat mengakibatkan suatu kerugian yang sangat besar baik kerugian materil maupun inmateril. Dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dilapangan tidak selamanya berjalan dengan lancar, pasti selalu dihadapi oleh berbagai kendala. Kendala itulah yang menjadi penghambat pekerjaan petugas Damkar.

Kendala yang dialami oleh anggota pemadam kebakaran saat melaksanakan pekerjaan mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan penanggulangan kebakaran dilapangan. sehingga masyarakat yang dilayani menimbulkan rasa kekecewaan terhadap petugas pemadam kebakaran. Adapun Kendala Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran adalah :

1. Kondisi armada kurang memadai

Mobil pemadam kebakaran merupakan prasana yang sangat penting bagi pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dilapangan. Kondisi mobil pemadam kebakaran yang sehat sangat menentukan keberhasilan anggota dilapangan dalam bertugas. Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar memiliki 8 (delapan) unit mobil kebakaran, dimana tidak semuanya dalam kondisi baik untuk di operasionalkan. Hal itu terlihat 4 rusak total, 3 patah pinggang dan 1 kondisi sehat. sehingga dengan terbatasnya jumlah armada yang kita punya menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas di lapangan.

2. Keterlambatan informasi dari masyarakat

Lambatnya penyampaian informasi dari masyarakat yang diterima langsung oleh anggota Damkar membuat anggota terburu-buru untuk segera sampai kelapangan dengan cepat. Terkadang apabila lokasi terjadi kebakaran yang sangat jauh dengan posko induk dengan waktu jarak tempuh berjam-jam sehingga api sudah terlanjur membesar, hal ini berdampak terhadap peyelamatan korban juga akan semakin sulit sebab resiko bangunan roboh, radiasi, api, dll. Oleh karena itu, kecepatan informasi dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting demi mengurangi terjadinya berbagai resiko dilapangan

3. Kondisi lokasi kebakaran

Anggota pemadam kebakaran selalu berupaya bagaimana penanggulangan kebakaran dapat dilakukan dengan baik. Kondisi lokasi kebakaran yang sangat sulit menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas dilapangan. Hal itu terlihat ketika lokasi kebakaran terjadi didalam perumahan gang sempit, akses yang susah ditembus, dan terkadang terhalang oleh portal yang tidak memungkinkan mobil bisa masuk sehingga anggota dilapangan berupaya mencari solusi agar pemadaman api dapat dilakukan secara maksimalmeskipun memakan waktu yang lama.

4. Jarak tempuh

Kabupaten Kampar hanya memiliki 1 (satu) pos pemadam kebakaran berada di ibu kota Kabupaten Kampar yaitu di Bangkinang. Memiliki 21 Kecamatan dan 250 Desa/Kelurahan dengan jarak tempuh yang bervariasi

disertai dengan jalan yang berlobang-lobang dan jalan sempit yang di penuh dengan kendaraan bermotor membuat kami terkadang lambat datang kelokasi kebakaran. Sehingga dengan jarak tempuh kebakaran yang sangat jauh menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas dilapangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang kebakaran di Kabupaten Kampar merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar
2. Tidak kapabelnya Bidang Pemadam Kebakaran bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat di Kabupaten Kampar.
3. Sumber Daya Manusia terhadap anggota pemadam kebakaran Kabupaten Kampar masih jauh dari harapan yang diinginkan sehingga belum kapabel dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Implementasi Kebijakan di Kabupaten Kampar belum berjalan optimal hal ini masih ditemukan belum memiliki Peraturan Bupati (Perbub) dan Standar Operasional Kebakaran (SOP) dalam penanggulangan kebakaran.

5. Keuangan Bidang Damkar di Kabupaten Kampar masih sangat jauh dari harapan yang diinginkan sehingga belum kapabel dalam pelaksanaan pekerjaan.
6. Kabupaten Kampar terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait disertai dengan melibatkan partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam menimalisir terjadinya kebakaran.
7. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas dan disiplin terhadap diri sendiri maupun anggotanya disamping itu selalu menyempatkan diri untuk berada ditengah-tengah anggota diwaktu istirahat.
8. Masih tingginya harapan dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kampar.
9. Kendala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau :
 - a. Kondisi armada kurang memadai
 - b. Keterlambatan informasi dari masyarakat
 - c. Kondisi lokasi kebakaran
 - d. Jarak Tempuh

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat menjadikan Bidang Pemadam Kebakaran menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri Dinas/Badan, tujuannya yaitu agar pelaksanaan penanggulangan kebakaran dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Pemerintah Kabupaten Kampar seharusnya membuat atau membentuk Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan (P2K) agar dapat menjangkau wilayah kebakaran di Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Bidang Pemadam Kebakaran agar sekiranya melakukan perekrutan anggota pemadam kebakaran dilakukan secara tersendiri, bertujuan agar mendapatkan kualitas SDM anggota pemadam kebakaran sesuai dengan yang diharapkan.
4. Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar kedepanya harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan kebakaran di lapangan bertujuan untuk memberikan panduan atau pedoman kerja agar kegiatan dilapangan dapat terkontrol.
5. Pemerintah Kabupaten Kampar harus dapat memberikan kesejahteraan hidup kepada anggota damkar, seperti gaji yang diterima sesuai dengn UMK dan asuransi kecelakaan kerja karena pemadam kebakaran ini merupakan pekerjaan mulia yang taruhnya dapat mengorbankan nyawa sendiri.
6. Untuk meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar secara maksimal harus bisa mengatasi apa yang menjadi kendala pemadam kebakaran selama ini sehingga pelaksanaan penanggulangan kebakaran tidak terhambat.

7. Agar dapat berjalan dengan lancar pekerjaan anggota Damkar dilapangan dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam membantu Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mencegah dan menimalisir terjadinya kebakaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amir, M. Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Arikunto, Suharismi, 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (edisirevisi)* cetakan keempat belas. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Assauri, Sofian. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Fahmi Amrusi. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nasamedia; Bandung.
- G. setya Nugraha, R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya.
- Hasibuan Malayu.S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia..* Jakarta; Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafii. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Refika Aditama.
- Jimly Asshidiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pesca sarjana*. Jakarta; Sinar Garafika.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi; Makasar.
- Kasumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta; Gava Media.
- La Ode Bariun. 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Kosntitusi Dalam Penyelesaian Sangketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Makassar; Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin.

- Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Muhadam Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT. raja Grafindo Persada.
- Moeharino. 2009. *Pengukuran Kinerja Bersbasis Kompetensi*. Bogor; Ghalia.
- Ndaraha. Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Penerbit Rieneka Cipta.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalis Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; PT. Alex Media Komputindo.
- Nurmayanti S.H, M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Rauf. Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Nusamedia; Yogyakarta.
- Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Rudana. 2006. *Pengaruh Kapabilitas dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta; STIA LAN.
- Salam, Dharma Satyawan. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta; Djambatan, Edisi Revisi.
- Sampurno, 2011. *Manajemen Strategi, Menciptakan Keunggulan Bersaing Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Sedarmayanti, 2004. *Manajemen Sumber Dqya Manusia*, Jakarta, Mandar Maju.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial* cetakan ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.

Singarimbu, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta; PT Roaja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* cetakan ke dua puluh . Bandung: Alfabeta.

Syafhendri. 2017. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru.

Syafie Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan, Kdisi Revisi*, Bandung, Mandar.

Pradjudi, Armosudiro. 2006. *Konsep Organisasi*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Zulwendri, 2009. *Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logos Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing (Studi Tentang Pelayanan Pemerintahan)*.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

D. Jurnal

Geovani Meiwanda. 2016. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 19 (251-263).

Ida Bagus Gede Wirawibawa Mantra. 2005. Kajian Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Perumahan (Suatu Kajian Pendahuluan di Perumahan Sarijadi Bandung). *Jurnal Permukiman Natak*. 3 (1-61).

Zulkifli, Ismail, dan Legowo Kamarubayana. 2017. Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur. *Jurnal AGRIFOR*. 14 P (1412-6885) O (2503-4960)

E. Sumber Lainnya

<https://www.google.com/amp/s/camargus.com/magazine/470/amp>.

<https://m.cnindonesia.com/nasional/20170922125809-20-243324/jakarta-paling-tinggi-alami-kasus-kebakaran>.